

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

Sektor Ritel Menggeliat, Ekonomi Menguat

Upaya Menghijaukan
Perekonomian



**Awas, Dampak Perang
Rusia-Ukraina!**

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Wakil Ketua Umum

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Wakil Sekretaris Jenderal

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

KONSULTANT

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993.
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Sektor Riil Bangkit

Lahir dan tinggal di Indonesia bisa jadi sebuah keberuntungan. Dalam kondisi apa pun, masyarakat Indonesia selalu punya peluang untuk mendapatkan penghasilan, termasuk saat pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Seorang sahabat yang menjadi *trainer* untuk warga Jepang yang bekerja di Indonesia bercerita bahwa mereka menganggap orang Indonesia lebih beruntung dibandingkan dengan orang Jepang. “Kalian di-PHK bisa jualan nasi uduk di pinggir jalan. Di Jepang tidak bisa itu dilakukan,” katanya. Kondisi ini memberi ruang yang lebih luas untuk pergerakan perekonomian. Tentu saja, terlepas dari adanya perbedaan budaya dan aturan antara dua negara tadi.



Pandemi COVID-19 melahirkan banyak *entrepreneur* baru di Tanah Air. Mereka yang lebih banyak berkegiatan di dalam rumah, melakukan aktivitas yang ternyata bisa memberikan nilai positif dari sisi finansial. Mereka yang mengalami PHK harus tetap bertahan untuk mendapatkan sumber penghidupan. Dunia maya pun berubah menjadi toko-toko virtual. Beragam barang ditawarkan di sana. Munculnya fenomena ini menguatkan ekosistem perekonomian digital.

Pandemi yang mengakibatkan krisis kesehatan dan kemanusiaan berujung pada krisis ekonomi. Banyak sektor dan hampir semua skala bisnis merasakan dampaknya. Jika pada krisis ekonomi sebelumnya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan, tidak demikian pada krisis ekonomi kali ini. Kelompok UMKM pun merasakan dampaknya.

Program vaksinasi yang berjalan dengan baik dan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan diyakini bisa menekan penyebaran COVID-19. Pemerintah pun secara bertahap melonggarkan kegiatan masyarakat. Alhasil, kondisi perekonomian membaik. Beberapa sektor lapangan usaha mulai menggeliat, dan bank pun sudah melakukan ekspansi ke sektor-sektor tersebut.

Pandemi secara bertahap sudah dapat diatasi dan sektor usaha mulai bangkit. Namun, perekonomian mulai terganggu karena terkendala pasokan beberapa komoditas di pasar global sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina yang pertama kali dilakukan pada 24 Februari 2022, menjadi awal mimpi buruk seluruh warga dunia. Pasalnya, Rusia dan Ukraina termasuk negara pemasok minyak bumi, gas alam, pupuk, dan gandum.

Bagi Indonesia, Rusia dan Ukraina memang bukan merupakan mitra dagang utama. Namun, karena Rusia dan Ukraina berperan dalam pasar global untuk beberapa komoditas, secara tak langsung hal ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai pergaularan internasional yang tertib dan tanpa pertikaian, Indonesia merasa bertanggung jawab terhadap terciptanya perdamaian dunia. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November 2022, menjadi agenda penting Indonesia sebagai penengah konflik Rusia-Ukraina.

Dalam perhelatan internasional itu, untuk pertama kalinya Indonesia ditunjuk sebagai presidensi forum kerja sama negara-negara yang berperan dalam ekonomi utama dunia. Indonesia tetap patuh pada peraturan untuk menghadirkan semua kepala negara anggota G20, termasuk pemimpin Rusia. Beberapa negara anggota G20 menentang rencana Indonesia ini, meski ada juga yang mendukung. Kemampuan Indonesia memimpin forum internasional ini pun dipertaruhkan. Dan, hasil KTT ini tentu akan berdampak pada perdamaian dan perekonomian dunia. ■

Dari Redaksi

1

Perbaikan Utama

Sektor Ritel Menggeliat, Ekonomi Menguat.....3

Permintaan kredit perbankan tumbuh positif sejak semester kedua 2021. Kenaikan permintaan kredit juga dibarengi dengan penurunan risiko kredit. Ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Dengan likuiditas yang melimpah, perbankan mempunyai ruang luas untuk melakukan ekspansi kredit, khususnya ke sektor-sektor yang mulai pulih dari tekanan pandemi COVID-19.



Regulasi

OJK Sempurnakan Aturan Laku Pandai7

Upaya Memajukan Perekonomian8

Perubahan iklim berpengaruh pada semua aspek kehidupan dan menjadi keprihatinan semua negara di dunia. Pelaku jasa keuangan di Indonesia pun harus mempertimbangkan aspek lingkungan dalam mengembangkan produknya. Ekonomi Hijau menjadi pegangan industri keuangan di Tanah Air.



Indikator

Hati-Hati! Inflasi Makin Tinggi, Bagaimana Sikap Pemerintah?12

Optimisme Terjaga, meski Indeks Menurun14

Neraca Dagang Surplus, Waspadai Ancaman Krisis Global16

Aktualita

Paylater Hadir, Kartu Kredit Tetap Eksis19

Setelah digempur pandemi, bisnis kartu kredit kini juga dihantam kehadiran cicilan skema bayar tunda atau paylater. Bagaimana tren penggunaan kartu kredit?



Keamanan Siber, Tantangan Digitalisasi Perbankan20

Internasional

Potensi Besar Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Meksiko22

Awas, Dampak Perang Rusia-Ukraina!24

Perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Perang yang berkepanjangan ini menimbulkan efek rambat pada perekonomian global. Negara-negara Eropa dan Amerika jadi pihak yang cukup terdampak.



Suplemen

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

- Bank Sahabat Sampoerna6
- Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati6
- Bank BJB10
- Bank Jateng11
- Bank Raya13
- Bank Victoria13
- Bank Mestika15
- Bank of China15
- Bank IBK Indonesia18
- Bank Ganesha18
- Bank Kesejahteraan Ekonomi25



Sektor Riil Menggeliat, Ekonomi Menguat

Permintaan kredit perbankan tumbuh positif sejak semester kedua 2021. Kenaikan permintaan kredit juga dibarengi dengan penurunan risiko kredit. Ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Dengan likuiditas yang melimpah, perbankan mempunyai ruang luas untuk melakukan ekspansi kredit, khususnya ke sektor-sektor yang mulai pulih dari tekanan pandemi COVID-19.

Selanjutnya cukup lama “tiarap” akibat pandemi Corona-virus Disease 2019 (COVID-19), sektor riil mulai menampakkan tanda-tanda pemulihan. Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh positif, yakni 3,69% pada 2021. Sebelumnya sempat turun 2,07% pada 2020. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang mulai dilonggarkan setelah pemerintah menggencarkan kegiatan vaksinasi. Bahkan, vaksin *booster* pun mulai dilakukan di titik-titik tertentu di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan pelonggaran tersebut, beberapa pelaku bisnis mulai bersiap melakukan ekspansi. Hal ini antara lain tecermin dari mulai meningkatnya permintaan kredit perbankan. Para debitur perbankan perlahan kembali bangkit usai dihantam badai pandemi. Para pelaku usaha pun tampaknya kembali percaya diri untuk melakukan *spending* maupun ekspansi. Kebutuhan kredit modal kerja maupun kredit investasi bagi pelaku usaha ini mendongkrak permintaan kredit perbankan.

Progres pemulihan ekonomi juga tampak dari makin melandainya restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. Ini menandakan kemampuan membayar para pelaku usaha yang menjadi debitur sudah beranjak pulih. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Februari 2022 *outstanding* restrukturisasi kredit mencapai Rp638,22 triliun atau turun Rp16,42 triliun dari bulan sebelumnya. Bila dibandingkan dengan posisi akhir 2021, nilai restrukturisasi kredit sudah turun Rp25 triliun. Dan, jika dibandingkan dengan posisi akhir 2020, jumlahnya sudah berkurang hingga Rp192 triliun.

Di lain sisi, perbankan saat ini terus berupaya menggenjot ekspansi kredit. Upaya mendorong pemulihan ekonomi ini disokong dengan likuiditas yang melimpah. Artinya, perbankan mempunyai ruang luas untuk melakukan ekspansi kredit. Karena itu, para bankir terus mencari sektor-sektor usaha yang sudah kembali menggeliat untuk dijadikan target penyaluran kredit.

OJK mencatat, hingga Februari 2022, fungsi intermediasi perbankan tumbuh positif. Pertumbuhan terjadi hampir di semua segmen, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ritel. Kredit perbankan naik 6,33% *year on year* (*yoy*) atau 0,93% *month to month* (*mtm*). Secara sektoral, hampir semua sektor utama mengalami peningkatan kredit secara bulanan, terutama sektor perdagangan, manufaktur, dan rumah tangga. Pada Februari 2022 kucuran kredit perbankan ke masing-masing sektor tersebut tercatat Rp19,5 triliun, Rp8,8 triliun, dan Rp7,1 triliun. "Hal tersebut mencerminkan dukungan perbankan dalam pemulihian ekonomi nasional terus membaik," kata Anto Prabowo, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK.

Akselerasi pertumbuhan kredit terjadi di segmen korporasi maupun perorangan. Bank Indonesia (BI) mencatat, pada Februari 2022 kredit korporasi meningkat 5,9% (*yoy*). Sedangkan, kredit perorangan tumbuh 7,3% (*yoy*). Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi dan kredit konsumsi juga mengalami peningkatan.

Namun, kredit modal kerja sedikit mengalami kontraksi.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, memaparkan bahwa kredit investasi terakselerasi dari 3,2% (*yoy*) pada Januari 2022 menjadi 4,9% (*yoy*) per Februari 2022. Kenaikan ini terutama ditopang sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kredit investasi sektor industri pengolahan tercatat naik 3,4% dan kredit investasi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,7%. Sementara, kredit konsumsi tercatat tumbuh 4,8%, yang ditopang penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

Selanjutnya, pada Februari 2022 kredit modal kerja (KMK) tercatat meningkat 7,1% (*yoy*), sedikit melambat dari 7,2% pada bulan sebelumnya. Perlambatan terjadi pada penyaluran KMK di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan. KMK sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan tumbuh 14,7% (*yoy*), melambat dibandingkan dengan bulan

sebelumnya yang tumbuh 15,5% (*yoy*), terutama kredit yang disalurkan untuk subsektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

"Sementara itu, KMK sektor industri pengolahan pada Februari 2022 tumbuh sebesar 9,7% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan Januari 2022 yang tumbuh 10,2% (*yoy*). Hal ini seiring dengan perlambatan kredit pada subsektor industri kimia dasar di DKI Jakarta," terang Erwin.

Seiring dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19, kredit perbankan sebenarnya mulai menunjukkan perbaikan pada semester kedua 2021. Penyaluran kredit kembali *rebound* dan tumbuh positif secara tahunan sejak Juni 2021. Pada periode sebelumnya kredit perbankan mengalami kontraksi karena menurunnya permintaan kredit.

Bank sendiri menjadi lebih selektif dan hati-hati dalam menggelontorkan kredit karena ketidakpastian masih tinggi. Namun, kredit perbankan kembali meningkat di atas level 5% sejak Desember 2021. Secara agregat, sepanjang 2021 kredit perbankan tumbuh 5,24% (*yoy*) atau menjadi

Rp5.768,58 triliun. Kualitas kredit pun terjaga, dengan *non performing loan* (*NPL*) di level 3,00%.

Sektor Potensial yang Dibiayai

Mengutip data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis OJK, pada Januari 2022 lima sektor lapangan usaha yang mendapatkan kucuran kredit terbesar adalah perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; pertanian, perburuan, dan kehutanan; konstruksi; serta transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Pada Januari 2022 kelima sektor ini menguasai 72,85% total kredit perbankan untuk lapangan usaha. Sebagai informasi, total kredit

Perkembangan Kredit Perbankan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Per Jan 2021 - 2022

(Rp Miliar)

No. Sektor yang Dibiayai	2019	2020	Δ (%)	2021	Δ (%)	Jan 2021	Jan 2022	Δ (%)
Pembiayaan untuk Lapangan Usaha								
1 Perdagangan Besar dan Eceran	1.006.069	942.188	-6,35	974.420	3,42	920.781	959.753	4,23
2 Industri Pengolahan	931.727	893.642	-4,09	951.109	6,43	865.303	942.998	8,98
3 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	369.903	385.586	4,24	415.515	7,76	381.697	412.763	8,14
4 Konstruksi	362.271	376.473	3,92	380.381	1,04	370.737	373.187	0,66
5 Transportasi, Perdagangan, dan Komunikasi	246.935	266.189	7,80	306.242	15,05	262.371	291.600	11,14
6 Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	269.360	259.978	-3,48	265.315	2,05	256.045	262.751	2,62
7 Perantara Keuangan	249.782	216.297	-13,41	224.714	3,89	207.929	223.227	7,36
8 Pertambangan dan Penggalian	134.315	124.618	-7,22	153.803	23,42	124.309	157.659	26,83
9 Listrik, gas, dan air	198.255	168.881	-14,82	159.701	-5,44	165.766	154.466	-6,82
10 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109.842	116.183	5,77	120.741	3,92	116.233	121.005	4,11
11 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	82.543	89.457	8,38	95.691	6,97	88.990	92.996	4,50
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	28.901	30.887	6,87	34.272	10,96	31.610	34.191	8,17
13 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.576	28.262	-15,83	28.513	0,89	28.276	27.957	-1,13
14 Perikanan	14.115	16.032	13,58	18.688	16,57	16.046	18.396	14,65
15 Jasa Pendidikan	14.194	13.594	-4,23	13.990	2,91	13.499	13.734	1,74
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	3.415	2.989	-12,47	3.872	29,54	2.966	3.834	29,27
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	280	358	27,86	365	1,96	357	339	-5,04
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1.976	2.490	26,01	716	-71,24			
Total Pembiayaan Lapangan Usaha	4.057.459	3.934.104	-3,04	4.148.048	5,44	3.852.915	4.090.856	6,18
Pembiayaan untuk Nonlapangan Usaha								
1 Pemilikan Peralatan Rumah Tangga	652.364	673.005	3,16	694.729	3,23	670.025	698.499	4,25
2 Pemilikan Rumah Tinggal	479.928	496.603	3,47	544.004	9,55	496.135	545.436	9,94
3 Pemilikan Kendaraan Bermotor	140.399	105.772	-24,66	99.101	-6,31	105.297	102.080	-3,06
4 Pemilikan Apartemen	22.309	22.826	2,32	26.100	14,34	22.907	26.058	13,76
5 Pemilikan Ruko/Rukan	24.340	22.004	-9,60	20.771	-5,60	21.788	20.952	-3,84
6 Lainnya	240.193	227.246	-5,39	235.831	3,78	225.655	225.526	-0,06
Total Pembiayaan Nonlapangan Usaha	1.559.533	1.547.456	-0,77	1.620.536	4,72	1.541.807	1.618.551	4,98

Keterangan:

- Δ : pertumbuhan (%);

- Disusun berdasarkan total kredit yang diberikan per Januari 2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali.

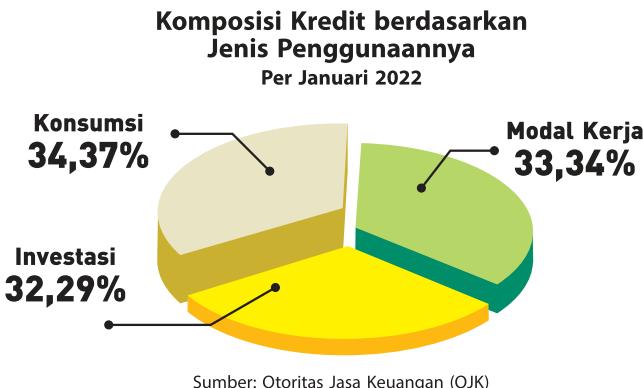
perbankan untuk lapangan usaha pada Januari 2022 mencapai Rp4.090,85 triliun. Angka ini naik 6,18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

SPI mencatat, sektor perdagangan besar dan eceran mendapat kucuran kredit paling besar pada Januari 2022. Sebanyak Rp959,75 triliun kredit perbankan mengalir ke sektor ini. Jumlah tersebut meningkat 4,23% secara tahunan ketimbang Januari 2021 yang tercatat Rp920,78 triliun.

Urutan kedua penerima kucuran kredit terbesar perbankan adalah industri pengolahan. Bila dibandingkan dengan Januari 2021, kredit sektor industri pengolahan naik lebih tinggi ketimbang perdagangan besar dan eceran, yakni sebesar 8,98%, dari Rp865,30 triliun menjadi Rp943,00 triliun. Sektor berikutnya yang mendapatkan kucuran kredit terbesar perbankan adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Per Januari 2022 kredit bank umum yang mengucur ke sektor ini mencapai Rp412,76 triliun atau tumbuh 8,14% dari Rp381,70 triliun pada tahun sebelumnya.

Sektor konstruksi termasuk sektor yang dilirik industri perbankan selama 2021. Sektor ini menduduki urutan keempat penerima kucuran kredit terbesar perbankan. Kegiatan pembangunan di beberapa daerah memang terus berjalan saat angka konfirmasi infeksi COVID-19 sempat naik pada 2021. Sektor ini mendapat kucuran kredit Rp373,19 triliun pada Januari 2022, meski kenaikan kredit sektor ini hanya 0,66% pada Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor kelima yang mendapat kucuran kredit terbesar perbankan adalah sektor transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Sektor ini mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan dengan empat sektor lainnya. Kredit sektor transportasi, perdagangan, dan komunikasi pada Januari 2022 naik 11,14% menjadi Rp291,6 triliun dari



Rp262,37 triliun pada Januari 2021.

Di antara 17 sektor yang dibiayai perbankan, pertumbuhan kredit paling moncer dibukukan sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Kredit sektor ini naik 29,27% pada Januari 2022 ketimbang tahun sebelumnya. Angka kucuran kreditnya memang hanya Rp3,83 triliun. Sektor ini sempat terpuruk selama 2019-2020. Kucuran kreditnya anjlok hingga 12,47%. Adanya pembatasan selama pandemi bisa jadi membuat orang yang biasa menggunakan jasa tersebut lebih berhati-hati. Namun, kredit di sektor ini kembali menggeliat pada 2021.

Bila kredit perbankan ke lapangan usaha mulai terserap pasar, bagaimana dengan kredit perbankan di luar lapangan usaha? Kredit untuk sektor di luar lapangan usaha juga tercatat meningkat. Angkanya pada Januari 2022 tumbuh 4,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kucuran kredit terbesar pada pembiayaan pemilikan peralatan rumah tangga (termasuk kredit multiguna). Untuk kelompok ini, pada Januari 2022 perbankan mengucurkan pembiayaan hingga Rp698,50 triliun atau naik 4,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Prediksi Pertumbuhan Kredit Perbankan 2022



6,5%-8,5%



5,1%-8,9%



6%-8%

Memasuki 2022, para bankir optimistis kinerja kredit akan lebih baik. Kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik – bahkan ada peluang turun status dari pandemi menjadi endemi – makin menumbuhkan optimisme kalangan bankir dan pelaku dunia usaha. Pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan terus berlangsung.

Mempertimbangkan sejumlah kondisi yang ada, banyak pihak yang memprediksi kredit perbankan akan tumbuh. OJK memperkirakan kredit perbankan pada 2022 bisa tumbuh 6,5%-8,5%. Sedangkan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masing-masing memproyeksikan kredit perbankan tumbuh 6%-8% dan 5,1%-8,9%.

Perbankan sendiri secara fundamental mempunyai kapasitas besar untuk melakukan ekspansi kredit. Likuiditas perbankan melimpah. Akhir Desember 2021 *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan ada di posisi 77,49%. Artinya, perbankan masih punya ruang untuk memacu pertumbuhan kredit. Pun demikian dari sisi permodalan. Perbankan memiliki modal yang tebal. *Capital adequacy ratio (CAR)* bank umum tercatat ada di posisi 25,66% pada akhir Desember 2021.

Meski begitu, kondisi perekonomian tahun ini bukan tanpa tantangan. Pemulihan ekonomi nasional bisa saja terdampak tantangan dari pihak eksternal, seperti normalisasi kebijakan di negara-negara maju ataupun dampak dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

Sebagai diketahui, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mulai menaikkan suku bunga Fed Funds Rate pada Maret 2022. Kebijakan ini bisa berdampak pada kenaikan suku bunga global. Sedangkan, ketegangan geopolitik sudah memicu harga-harga komoditas global, termasuk energi dan pangan. Imbasnya, sejumlah negara mengalami kenaikan inflasi. Ketegangan ini juga bisa memengaruhi mata rantai perdagangan global dan distribusi pasokan. ■

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA



**Bank Sahabat
Sampoerna**

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. SAHABAT SAMPOERNA

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015. dengan ini PT Bank Sahabat Sampoerna mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2021 Rp. 185.041.928.154.-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di Bank Sahabat Sampoerna. akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 sebagai Lampiran.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015. dengan ini Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP SMS) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2021 Rp. 96.018.443.862.-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di KSP SMS. akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 sebagai Lampiran.

OJK Sempurnakan Aturan Laku Pandai

Untuk lebih mengoptimalkan peran agen Laku Pandai, OJK menerbitkan POJK 1/POJK.03/2022. Regulasi ini merupakan amendemen POJK 19/03/2014. Apa saja perubahan dari regulasi yang baru ini?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong akses keuangan masyarakat untuk pembangunan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang ditempuh OJK yaitu melalui pemanfaatan agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Laku Pandai digagas OJK pada 2014 dan dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19/03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Beleid ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia, yang pada 2014 di angka 36%. Keberadaan agen Laku Pandai merupakan salah satu pendorong inklusi keuangan di Tanah Air. Buktinya, angka inklusi keuangan di Indonesia menjadi 76,19% pada 2019.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dapat diatasi, OJK menyempurnakan POJK di atas melalui POJK Nomor 1/POJK.03/2022. Aturan yang berlaku pada 6 Januari 2022 ini merupakan upaya OJK untuk mengoptimalkan agen Laku Pandai. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK, Teguh Supangkat, mengatakan, OJK merasa perlu menyesuaikan ketentuan yang ada lantaran pada POJK sebelumnya terdapat beberapa batasan tertentu dan belum bisa mengakomodasi perubahan dan perkembangan kebijakan terkait program pemerintah yang ada, misalnya batas maksimum transaksi dan saldo rekening serta batas maksimum nominal plafon kredit atau batas pembiayaan bagi nasabah mikro. Dengan adanya amendemen POJK ini diharapkan program Laku Pandai bisa senantiasa relevan dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun perubahan teknologi informasi yang ada.

“Pembentukan POJK dalam proses pemerintah yang mengacu pada proses pembuatan aturan dengan mendengarkan pendapat industri, publik, dan proses harmonisasi di Kemenkumham,” ujar Teguh.

Teguh menguraikan setidaknya terdapat tujuh pokok perubahan ketentuan aturan Laku Pandai. Satu, menyederhanakan klasifikasi agen dari yang sebelumnya tujuh menjadi tiga. Agen yang pertama kali bekerja sama harus mulai dari klasifikasi A, yang hanya melayani transaksi tabungan dasar atau *basic saving account (BSA)*, uang elektronik dan transaksi asuransi mikro. Agen dengan klasifikasi B dapat menawarkan transaksi *BSA*, kredit atau pembiayaan mikro, serta transaksi tabungan selain *BSA*, kecuali pembukaan dan penutupan rekening. Sementara, agen klasifikasi C memberikan layanan seperti agen klasifikasi B, ditambah dapat memberikan layanan transaksi terkait produk keuangan lain.



Agen Laku Pandai; dioptimalkan

Dua, penyesuaian karakteristik *BSA* dan kredit mikro untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Maksimum saldo simpanan Rp20 juta, dengan akumulasi transaksi Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun apabila sudah menjadi debitur dan batas maksimum kredit Rp20 juta.

Tiga, penyesuaian skema kerja sama agen Laku Pandai agar bank dapat mewakili agen untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lain. misalnya terkait perusahaan asuransi. Empat, kerja sama agen Laku Pandai dengan kelompok usaha bank (KUB). Lima, pemanfaatan perangkat elektronik dalam proses *customer due diligence (CDD)*, sehingga nantinya verifikasi nasabah dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Enam, perubahan pengaturan penggunaan pihak ketiga untuk mendukung operasional agen. Di poin ini perbankan diperbolehkan menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan tertentu, seperti perekutan, pengawasan, dan pemantauan agen, pelatihan dan edukasi agen, hingga manajemen likuiditas agen. Tujuh, terkait pelaporan perkembangan agen Laku Pandai melalui sistem aplikasi pelaporan *online* OJK (APOLO). “Melalui penerbitan POJK ini, ke depan bank diharapkan dapat terus mengembangkan penyelenggaraan Laku Pandai,” harap Teguh.

Berdasarkan data OJK. per Desember 2021 ada 35 bank yang mempunyai agen Laku Pandai, dengan total 1,45 juta agen, sekitar 1,41 juta individu dan sisanya sebanyak 32,61 ribu agen berbadan hukum. Total tabungan *BSA* Laku Pandai telah mencapai Rp15,7 triliun yang berasal dari 34,87 juta rekening. Sebanyak 29,16 juta nasabah atau 83,64% nasabah *BSA* masih terpusat di Jawa.

Sementara, dari sisi *outstanding BSA* provinsi, jumlah *outstanding BSA* tertinggi adalah Jawa Tengah yaitu sebesar Rp2,6 triliun atau 16,65% dari total *outstanding BSA*. ■

Upaya Menghijaukan Perekonomian

Perubahan iklim berpengaruh pada semua aspek kehidupan dan menjadi keprihatinan semua negara di dunia. Pelaku jasa keuangan di Indonesia pun harus mempertimbangkan aspek lingkungan dalam mengembangkan produknya. Taksonomi Hijau menjadi pegangan industri keuangan di Tanah Air.

Keinginan pelaku industri jasa keuangan untuk terlibat dalam penyelamatan bumi bukan sekadar pencitraan melalui komunikasi ramah lingkungan atas produk dan tujuan perusahaan. Komitmen mereka diperkuat dengan terbitnya Taksonomi Hijau Edisi 1.0 yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2022. Taksonomi Hijau adalah klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi di beberapa negara lain.

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, menjelaskan bahwa OJK akan terus menyempurnakan klasifikasi dari Taksonomi Hijau. Saat ini OJK tengah mengkaji 2.733 klasifikasi dan subsektor ekonomi, yang 919 di antaranya telah dikonfirmasi Kementerian terkait. "Nantinya jumlah klasifikasi akan terus bertambah seiring dengan konfirmasi dari Kementerian," tambah Wimboh.

Dalam menyusun Taksonomi Hijau ini OJK menggandeng beberapa kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf). Taksonomi Hijau menjadi kebutuhan yang urgent karena konsep ini merupakan acuan pengembangan produk dengan prinsip berkelanjutan.

Industri keuangan memegang peranan penting dalam memfasilitasi transisi menuju ekonomi hijau karena sektor ini berperan penting dalam pemberian modal kepada pelaku



Perkebunan kelapa sawit; menimbang dampak sosial, lingkungan dan tata kelola.

usaha yang proses bisnisnya bisa berdampak positif atau negatif bagi lingkungan. Kesadaran untuk mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam mengambil keputusan investasi cukup besar saat ini. Aset global yang menggunakan pertimbangan LST dalam mengambil keputusan investasi telah meningkat dan diperkirakan mencapai US\$40,5 triliun pada 2020.

Taksonomi Hijau disusun secara struktural berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tidak hanya fokus pada kelompok yang dikategorikan hijau, tapi juga sektor yang belum terklasifikasi hijau. Dalam perkembangannya nanti, Taksonomi Hijau tetap membuka ruang untuk kegiatan usaha yang belum tercantum di KBLI sesuai dengan klarifikasi kementerian terkait.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa sebanyak 2.733 sektor telah dikaji dan 919 sektor di antaranya terklarifikasi ambang batasnya oleh kementerian terkait. Namun, dari 919 sektor ini, sebanyak 904 sektor belum secara langsung dikategorikan sebagai sektor hijau. Hanya 15 sektor yang

secara langsung masuk dalam sektor hijau.

Dalam Taksonomi Hijau, sektor usaha diklasifikasikan dalam tiga kategori. Satu, kelompok hijau, yakni kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional.

Dua, kelompok kuning, yakni kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria ambang batas hijau. Penentuan kegiatan usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran dan dukungan praktik terbaik lainnya. Yang terakhir adalah kelompok merah, yakni tidak menerapkan praktik perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta tidak memenuhi persyaratan kelompok hijau dan kuning.

Tantangan ke Depan

Dalam sambutan tertulisnya, Wimboh mengatakan bahwa implementasi Taksonomi Hijau akan menghadapi tantangan. Salah satunya, pemahaman dan pendekatan yang beragam dalam penentuan ambang batas kriteria hijau. Tentu hal ini membutuhkan koordinasi secara berkesinambungan. Mengingat kemungkinan akan adanya perkembangan zaman terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perluasan usaha, serta perubahan kebijakan, maka Taksonomi

Taksonomi Hijau disusun secara struktural berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tidak hanya fokus pada kelompok yang dikategorikan hijau, tapi juga sektor yang belum terklasifikasi hijau.

Hijau Edisi 1.0 pun bisa berubah.

Taksonomi Hijau sudah diterapkan di beberapa negara. Pada 2015 People's Bank of China (PBOC) melalui Green Finance Committee of The China Society for Finance and Banking telah menerbitkan Green Bond Endorsed Projects Catalogue sebagai panduan bagi lembaga keuangan dan perusahaan publik yang akan menerbitkan *green bond*. Sedangkan, untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, telah disahkan The Taxonomy Regulatory (TR) pada 2019 sebagai dasar hukum European

Union (EU) Taxonomy. Selanjutnya, pada 2020 EU Technical Expert Group on Sustainable Finance menerbitkan *final report*-nya.

OJK juga aktif dalam merumuskan ASEAN Taxonomy bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam forum ASEAN Taxonomy Board (ATB). ATB telah menerbitkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 1. Dokumen ini digunakan untuk pedoman bersama di lingkungan negara-negara anggota ASEAN atas penerapan keuangan berkelanjutan untuk memenuhi tujuan internasional dan di lingkup ASEAN.

Pengembangan Taksonomi Hijau di tiap negara memiliki kendala yang berbeda. Kendala yang umum dihadapi adalah minimnya pembiayaan yang berkelanjutan. Nah, dengan hadirnya Taksonomi Hijau, diharapkan makin banyak pembiayaan untuk sektor usaha yang berwawasan lingkungan. ■

Komitmen dari Paris

Kondisi bumi yang makin tidak nyaman akibat kenaikan suhu global disadari semua negara di dunia. Menyikapi kondisi ini, berbagai kesepakatan sudah dilakukan. Salah satunya, melalui sebuah konvensi di Paris yang dihadiri 195 negara, pada 12 Desember 2015. Dalam konvensi ini, negara yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bersepakat menghadapi perubahan iklim global dengan berupaya menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2° Celcius di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya kenaikan suhu di bawah 1,5° Celcius di atas masa pra-industrialisasi.

Konvensi tersebut juga mendorong semua negara mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, menciptakan ketahanan iklim, menuju pembangunan rendah emisi tanpa mengganggu produksi pangan, serta menyiapkan pendanaan untuk menghadapi situasi tersebut.

Sebelum tercetus *Paris Agreement*, sudah ada langkah yang diambil beberapa negara untuk menyelamatkan bumi. Negara-negara yang tergabung dalam UNFCCC pada 1997 mengadakan pertemuan di Tokyo, Jepang.

Dalam pertemuan ini, negara-negara yang hadir sepakat untuk mengadopsi Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Protokol Kyoto menjadi dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 5% dari tingkat emisi pada 1990. Target ini untuk periode 2008–2012. Seiring dengan berjalaninya waktu, Protokol Kyoto diperbarui dengan *Paris Agreement*.

Sebagai kelanjutan dari *Paris Agreement*, negara-negara yang menyetujui harus menyusun Nationally Determined Contribution (NDC). Melalui NDC, Indonesia menyusun langkah-langkah mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim. Hal ini dilakukan untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi.

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional, dibandingkan bila tanpa mitigasi atau *business as usual* (BAU). Komitmen ini menjadi titik awal pelaku bisnis berorientasi pada penyelamatan bumi dalam setiap langkah bisnisnya.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
(“bank bjb”)

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010, (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya; dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (“bank bjb”) mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut :

Tahun 2021 : Rp. 534.057.064.712

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021.



PIUTANG YANG NYATA - NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG)

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009 dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Tahun 2022 sebagai berikut:

TAHUN 2022 : Rp. 182.545.114.301,00

Rincian Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang bersamaan dengan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022.

Informasi Penting Kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih:

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kepada Debitur yang terkait di **Bank Jateng** agar masing-masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. **Bank Jateng** senantiasa memenuhi Undang - Undang Perpajakan dan Undang -Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila **Bank Jateng** dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada **Bank Jateng** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini;
3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi **Bank Jateng** di tahun 2022. Demi Keadilan, apabila piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan/ menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan;
4. **Bank Jateng** telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan;
5. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal **Bank Jateng**. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang Nyata – Nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi Bank Jateng, maka masing-masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang – Undang beserta Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Hati-Hati! Inflasi Makin Tinggi, Bagaimana Sikap Pemerintah?

Inflasi Indonesia pada 2021 terkendali pada level yang rendah dan stabil, yaitu sebesar 1,87% (yoY). Pemerintah harus mampu menjaga inflasi di tengah isu geopolitik agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

Situasi geopolitik yang makin memanas akibat konflik Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan harga komoditas dan energi karena terhambatnya rantai pasok akibat sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Banyak pihak cemas, kondisi yang entah sampai kapan akan berlangsung ini akan berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi global, termasuk Indonesia, pascapandemi COVID-19.

Terlebih lagi, kenaikan harga komoditas ini memicu tingkat inflasi di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Tercatat, inflasi Eropa naik mencapai 7,5% per Maret 2022, atau lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yang tercatat di angka 5,9%.

Kebijakan moneter pun dilakukan pemerintah AS dan negara Eropa sebagai upaya meredam munculnya risiko lain yang timbul akibat lonjakan inflasi. Namun, pengetatan kebijakan yang dilakukan justru mengganggu pemulihan ekonomi di berbagai negara.

Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Muhammad Edhie Purnawan, mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi inflasi global yang diprediksi masih panjang mengingat perang kedua negara, Rusia-Ukraina, masih berlangsung. Maka dari itu, koordinasi antara regulator seperti Bank Indonesia dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjaga laju inflasi hingga akhir 2022.

“Inflasi is everyday is everywhere. Persoalan harga-harga yang meningkat, persoalan macam-macam termasuk seperti persoalan pandemi. Inflasi itu sama seperti perampok, mematikan. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harus mempersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal ini,” ujar Edhie.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,66% secara bulanan (*month to month/mtm*). Menurut BPS, inflasi Maret 2022 merupakan yang tertinggi sejak Mei 2019.

**Perkembangan Inflasi Maret 2021 - 2022
(Dalam Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).



Transaksi di pasar tradisional; inflasi global masih panjang.

Tiga penyumbang terbesar inflasi Maret 2022 berdasarkan kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,47% (*mtm*) dan memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,38%.

Ironisnya, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi meningkatkan inflasi sejak Januari 2022, yakni penyesuaian harga *liquefied petroleum gas (LPG)* nonsubsidi ukuran 12 kilogram (kg) dan 5,5 kg pada 27 Februari 2022. Kenaikan harga *LPG* ini mempertimbangkan kemampuan pengguna *LPG* nonsubsidi dan menyesuaikan perkembangan harga minyak dan gas di pasar dunia.

Di lain sisi, harga beberapa kebutuhan pokok terus melambung, seperti minyak goreng, yang diikuti dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Naiknya harga *crude palm oil (CPO)* di pasar dunia mendorong pengusaha lebih memilih untuk mengekspor *CPO* ketimbang memikirkan pasokan dalam negeri.

Naiknya inflasi pada 2022 makin tak dapat terhindarkan ketika pada September 2021 Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan 12% pada 2025. Pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah tersebut sepanjang pemerintah memiliki strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. ■



DEBITUR YANG DIHAPUS BUKU PT BANK RAYA INDONESIA, TBK TAHUN 2021

Rp3.075.628.882.247

RINCIAN DEBITUR YANG DIHAPUS BUKU SEBAGAIMANA TERCATAT DI PT BANK RAYA INDONESIA TBK, AKAN DISERAHKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2021 SEBAGAI LAMPIRAN



DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto maka dengan ini PT Bank Victoria International Tbk mengumumkan daftar piutang tersebut sebagai berikut:

Tahun 2021 Sebesar Rp. 411.311.377.869.-

NO.	NAMA	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	NO.	NAMA	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
1	PT. Buana Citra Khatulistiwa	84.555.000.000	11	Didi Setiawan	256.974.529
2	PT. Kurnia Jabbar Raya	10.505.821	12	Liman Kusanto	415.490.903
3	PT. Ikhtiar Sejahtera Bersama	2.806.000.000	13	Richie Wirjan	3.371.072.463
4	Hiantoro Arifin	771.194.530	14	Dhany Andreas	799.108.223
5	PT. Inter Medika Utama	1.700.000.000	15	Dian Sumarta	261.103.009
6	Hariudin	448.719.348	16	PT. Sari Semesta Utama	43.263.294.234
7	Handi Djaja Tanidja	413.252.207	17	PT. Andalan Finance Indonesia	50.660.920.848
8	Rody Mulyanto	253.116.932	18	PT. Delcoprima Pacific	220.600.110.883
9	Siti Badrul Laela	260.193.393		JUMLAH	411.311.377.869
10	Syarifudin Sidik	465.320.545			

Rincian daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Masuk Bursa bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

Optimisme Terjaga, meski Indeks Menurun

Survei konsumen BI pada Maret 2022 menunjukkan angka sedikit menurun, meski masih di area optimistis. Hal ini menunjukkan bahwa optimisme masyarakat masih terjaga.

Tren pemulihan ekonomi di Indonesia akan terus berlanjut bila masyarakatnya juga terus optimistis. Setidaknya, itulah yang diharapkan dari survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Survei yang rutin dilakukan bank sentral ini menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2022 yang tercatat 111,0. Meski turun tipis dibandingkan dengan Februari 2022 yang mencapai 113,1, angka ini masih berada di area optimistis.

Membaiknya keyakinan konsumen pada awal tahun ini disebabkan oleh membaiknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini. IKE Januari berhasil memasuki level optimistis, yaitu di atas 100 atau tepatnya 100,9 dari 99,9 pada bulan sebelumnya.

“Keyakinan konsumen yang tetap terjaga pada Maret 2022 ditopang oleh tetap kuatnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi mendatang, baik ekspektasi terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, maupun kegiatan usaha,” jelas Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono.

Selama Januari hingga Maret 2022, survei BI terkait dengan IKK, IKE, dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) menunjukkan tren menurun. Pelonggaran kegiatan masyarakat



Pengunjung pusat perbelanjaan; konsumen optimistik

tampaknya belum berdampak signifikan terhadap aktivitas bisnis selama Januari sampai dengan Maret 2022, meski sudah menunjukkan arah yang lebih baik.

Pada Januari, Februari, dan Maret 2022 IKE secara berturut-turut berada di angka 100,9, 95,5, dan 93,9. Melambatnya IKE selama tiga bulan tersebut disebabkan melambatnya penghasilan masyarakat, masih minimnya ketersediaan lapangan kerja, dan menurunnya pembelian barang tahan lama (*durable goods*).

IEK juga melambat dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2022. Selama Januari, Februari, dan Maret 2022 IEK berturut-turut berada di posisi 138,3, 130,8, dan 128,1. Melambatnya IEK disebabkan melambatnya komponen ekspektasi penghasilan, kegiatan usaha, dan ketersediaan lapangan kerja.

Sementara itu, perkiraan menguatnya perekonomian dan konsumsi masyarakat sudah terlihat dari meningkatnya tingkat belanja masyarakat berdasarkan hasil survei Mandiri Institute. Pada kuartal pertama 2022 belanja masyarakat mencapai level tertinggi sepanjang pandemi. Mandiri Spending Index (MSI) mencapai 143,3 pada minggu pertama Januari 2022 atau tumbuh 31% (*year on year/oy*).

Head of Mandiri Institute, Teguh Yudo Wicaksono, pada Maret 2022 menerangkan bahwa hal itu selaras dengan persiapan Ramadan dan Lebaran 2022 serta pelonggaran mobilitas setelah tingkat vaksinasi massal diperluas. Tren peningkatan tingkat belanja ini juga diperkirakan akan berlanjut hingga pertengahan Mei 2022.

Lebih jauh, tingkat belanja di semua wilayah Indonesia kembali meningkat pada awal Maret 2022. Dibandingkan dengan wilayah lain, kenaikan lebih tinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi juga mencatatkan tingkat belanja yang tinggi terkait dengan kenaikan harga komoditas. ■

Survei Konsumen Januari - Maret 2022

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK)



INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)



INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)



Sumber: Bank Indonesia.



**DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT.BANK MESTIKA DHARMA. Tbk - TAHUN 2021**
(pasal 6 ayat 1 huruf h. UU No.36 Tahun 2008 ttg Pajak Penghasilan)

NAMA	JUMLAH SALDO	NAMA	JUMLAH SALDO	NAMA	JUMLAH SALDO	NAMA	JUMLAH SALDO	NAMA	JUMLAH SALDO
SURONO	8.915.000	JHON EDIS SIHOMBING	44.342.000	YUSNIWATI	15.873.000	SUARNO	845.553.102	EJA	22.857.497
SIUYATIK	10.800.000	RAMLI VICTOR SILTTON	48.370.000	BATARA JAYA ABADI PT.	10.457.877.235	SAIFUL BAHRI	326.112.321	SAANAH	37.689.298
SUSANTO	20.419.900	HERMAN DAMANIK	73.287.000	EMILIA OSKA	16.975.000	FAISAL	329.135.995	SUPARNI	33.319.605
ADITYA HERMAWAN PUTR	14.767.000	MUGI RAHYAU	14.337.000	RUSTAM	11.616.000	FREDY	19.450.856	SOEMARSONO	128.502.168
SAMSIAH HASIBUAN	16.515.000	ERWAN	29.325.000	JULIANTO	14.340.920	RUDY WIJAYA	149.308.860	SARPIN	100.867.056
REBO	11.425.000	YOPAN NOHARI	52.006.000	LASTA SINAGA	41.308.000	ALI AMRAN S	512.556.632	MASNAH	99.999.816
PAIMIN	10.247.000	AGUSTINA	19.585.570	SUTOMO	19.903.000	SUNARYO	110.757.314	J SAHETAPY BC.HK.	112.349.197
NURMAIDA TAMBUNAN	9.365.000	MANUA LUDDIN SIREGAR	32.587.000	HOTMARI SINAGA	22.431.000	SUWANDY	217.245.537	M ACHYAR	60.478.706
ABDUL RAIS NASUTION	24.287.000	MARIMAN HASUDUNGAN S	11.087.000	LAMBOK SITUMORANG	8.812.000	MUHAMMAD KOTIBIN IR.	78.188.382	EKHANIAH	106.110.646
MUHAMMAD SAPARUDIN	24.419.000	LAMIDI	14.259.000	LASINO	17.937.000	SUHARTONO	1.506.587.000	NGATINEM	42.790.957
SUGIYATIK	11.494.000	SUMANTRI	15.987.000	PONIYEM	16.245.000	ZEFRI	51.228.658	SYAFRUDDIN AKIB	157.266.511
SARTONO	13.881.000	SUPRANTI	18.774.000	HOTINA FRIDA NAIBAHO	8.369.000	ERRI SUSANTO	86.709.958	I PUTU WIRYADA	138.533.378
LILIK SUPINA	40.798.000	BERTON RAJAGUKGUK	16.479.000	KARTINI	32.111.172	JHONSONMIN	1.208.707.002	FATHUR RAHMAN	134.178.063
SIYETNO	10.671.000	JUIUR LUMBANTORUAN	25.009.000	NURLELA	17.438.000	BUDIMAN	4.082.798.797	WAGIRAN	132.907.947
PONIRIN	21.360.000	PAULUS PURBA	22.937.756	YUNITA SITUNGKIR	13.029.000	EDDY TANJAYA	227.896.833	IDA BAGUS SUARJAYA	71.449.450
YATI SURYA NINGSIH L	8.783.000	RIZA FAHMY	13.585.000	DJOHAN ANG	1.957.211.341	ANTONY DARWIN IR.MS.	1.326.699.389	ETHI RUHAETI	49.419.222
ALINAH	20.081.900	NASIANTO	17.818.920	KHO SOK KING	156.080.227	KEVIN CUANDRA	405.297.904	E MARSUM	74.328.754
BANIAK	33.287.000	ORANG KAYA SYAH JOHA	13.763.000	DODY IRWANSYAH DAMANIK	372.234.388	TONI ANDESA S.E.	79.964.883	NUR HAYATI	37.190.107
NURHAYATI	20.234.000	RIZAL CHOIRUDIN	15.078.000	RENOL SAPUTRA	599.379.171	RAMLAN SIMANJUNTAK	185.448.532	ATIAH	84.229.482
ALEX JUNICARDO SIMAN	45.253.000	HAMAOLAN MANURUNG	17.337.000	HERAWATY	220.176.854	KARYA LESTARI MANDIRI CV.	599.084.265	SULIANAH	67.387.606
JOKO SYAHPUTRA	9.779.000	LIBER DAVID SIMANJUN	28.695.000	SUGIONO	223.105.269	RICHARD	180.262.389	R DALWURI ATMODJO H.DRS.	87.592.230
SUGITO	14.419.000	WARDI	11.567.720	YASONAMA HULU	275.148.415	WITANTO EFFENDI	258.305.743	NURAIIDAH	50.555.546
HERAWATI	16.777.000	ASNAH	13.898.000	TEUKU FURQAN	380.064.505	DALIMAN	104.143.275	AHMAD SUTISNA	161.975.183
AMRUL RIZAL NASUTION	14.247.000	MHD NAFIAH NASUTION	19.656.000	DEDDY WIJAYA	351.093.232	SITI SALMAH ILYAS A MA PD HJ.	43.937.806	SOEKADI	131.085.061
SHERLY VARINA SIREGA	10.077.000	PAINO	18.064.000	WULAN SARI	13.140.000	ABNU MUDJID MSC IR.	72.934.601	SUKENI	42.729.498
IMAN YUSDIANTO	24.575.000	NENI TRIANA	17.685.000	RUSNANI	8.121.000	JUNADEI	112.737.596	ANAH SUHAENAH	163.016.279
EVA SUSANTI	10.087.000	PONJAN	15.046.000	TULUS FERNANDO	14.417.000	JOAO BAPTISTA DO ESPIRITO SANTO	121.379.396	SLAMETO	111.219.357
SURIADIY	17.603.000	MISNATI	24.253.000	SUWANTO	13.200.000	YETTI ROHAEKI	49.150.073	IG SUGHARDI	93.143.607
YANTI RAMADANA	36.087.000	TUGIMUN	31.433.000	SUNDARI	8.881.000	NIRDA ARYATI	56.722.685	YANNI	53.664.753
RISMAWATI	11.642.000	RUTH JATIE MARIA HUT	14.497.000	MONDRAKER SITEPU	16.444.618	TAN O EN	71.677.835	JOHANNES RUSLI	1.992.592.386
SUYATNI	24.842.000	SUKARTIK	15.928.900	SUTRISNO	20.955.466	ENI SUHAENI	36.439.936		
MUHAMMAD IDRIS	14.803.000	SUJATIK	10.409.000	SARIFUDIN IR.	75.015.385	ETY ASMIATI	39.589.265	TOTAL	34.813.385.048



DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h UU No. 36 tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015), dengan ini Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta (NPWP 02.058.456.1-053.000) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH (Rp.)
1	PT. MEGATAMA CITRA MANDIRI	7.372.763.535
2	FRANKY KANTONO	13.768.496.390
TOTAL		21.141.259.925

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing I Jakarta Selatan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

Neraca Dagang Surplus, Waspadai Ancaman Krisis Global

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global dan tumbuhnya perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia, kinerja ekspor-impor Indonesia mencatatkan tren pertumbuhan. Ini menjadi sinyal positif. Namun, invasi Rusia ke Ukraina yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada perekonomian global, patut diwaspadai.

Mendekati akhir 2021, dunia digemparkan oleh kehadiran Omicron, varian teranyar Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penularan atau penyebaran varian ini lebih cepat ketimbang varian sebelumnya, yaitu Delta. Angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia dan dunia pun kembali melonjak. Tak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, pandemi juga memberi tekanan pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, keadaan perlahan membaik.

Sebelum munculnya, varian Omicron, sejatinya perekonomian global sudah menunjukkan perbaikan, yang ditandai dengan pergerakan indeks manufaktur atau *purchasing managers index (PMI)*. Sejumlah negara mitra dagang Indonesia pun mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Tiongkok, misalnya, Sepanjang 2021 negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia ini perekonomiannya tumbuh 8,1% secara tahunan atau *year on year (yoY)*. Demikian pula dengan Amerika Serikat (AS) yang tumbuh 5,7% (*yoY*), Korea Selatan (Korsel) 4% (*yoY*), Singapura 7,2%, Vietnam 2,58% (*yoY*), dan Hong Kong 6,4% (*yoY*).

Selain dipengaruhi kondisi global yang mulai membaik dan perekonomian negara mitra dagang yang tumbuh positif, Indonesia juga kecipratan untung dari meningkatnya harga komoditas yang turut mendorong kinerja ekspor barang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2022 ekspor Indonesia mencapai US\$20,46 miliar atau tumbuh 34,14% ketimbang Februari 2021. Bila dibandingkan dengan Januari 2022, angka ekspor juga tercatat naik 6,73%.

Pada Februari 2022 nilai ekspor migas dan nonmigas terlihat menunjukkan kenaikan. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya (*month to month/mtm*), ekspor migas dan nonmigas pada Februari 2022 masing-masing naik 10,39% dan 6,55%.



Amerika Serikat; mitra dagang yang surplus neraca perdagangannya

Tiongkok, AS, dan Jepang masih menjadi tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Jika di-*breakdown*, pangsa ekspor Indonesia ke Tiongkok tercatat 19,12%, sementara ke AS dan Jepang masing-masing 12,29% dan 8,76%.

Industri pengolahan yang nilai eksportnya mencapai 78,84% dari total ekspor nasional masih menguasai pangsa ekspor migas dan nonmigas nasional selama Januari-Februari 2022. Di posisi berikutnya ada sektor pertambangan yang menguasai 14,56% pasar ekspor nasional. Sementara, sektor migas serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing menguasai 4,78% dan 1,82%.

Bila nilai ekspor Februari 2022 menunjukkan angka positif, bagaimana dengan nilai impor? Nilai impor Indonesia pada Februari 2022 mencapai US\$16,64 miliar. Dibandingkan dengan Januari 2022, angka ini menurun 8,64% (*mtm*), tapi naik 25,43% (*yoY*) ketimbang Februari 2021. Peningkatan

Neraca Perdagangan Juni 2021 - Februari 2022 (Dalam US\$ Miliar)



Ekspor-Import Indonesia Februari 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik.

impor terbesar terjadi di komoditas gula dan kembang gula. Impor barang komoditas ini naik 117,8% dibandingkan dengan Januari 2022. Sedangkan, impor kelompok besi dan baja menurun 368,2% dibandingkan dengan Januari 2022. Penurunan impor besi dan baja ini merupakan yang terbesar pada Februari 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Pada Februari 2022 Tiongkok tercatat sebagai negara importir nonmigas terbesar dengan menguasai pangsa 33,73%. Selanjutnya, impor nonmigas dikuasai Jepang dan Thailand dengan pangsa masing-masing 8,40% dan 7,51%.

Dengan nilai ekspor dan impor Februari 2022 yang berada di posisi US\$20,46 miliar dan US\$16,64 miliar, neraca perdagangan Indonesia pun surplus US\$3,83 miliar. "Neraca perdagangan Indonesia secara beruntun mengalami surplus," ujar Margo Yuwono, Kepala BPS.

Tiga negara mitra dagang utama yang neraca perdagangannya dengan Indonesia surplus pada Februari 2022 adalah AS, India, dan Filipina. Sedangkan, tiga mitra dagang utama yang neraca perdagangannya defisit adalah Tiongkok, Thailand, dan Australia.

Dampak Perang Rusia dan Ukraina

Neraca perdagangan yang surplus pada Februari 2022 menjadi catatan positif bagi Indonesia. Namun, kondisi perekonomian global yang sedikit melemah karena dampak perang Rusia dan Ukraina mesti diwaspadai. Menurut Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ketergantungan Indonesia terhadap Rusia dan Ukraina memang tak terlalu tinggi. Namun, perang itu berdampak pada perekonomian global, dan Indonesia bisa terkena imbasnya.

Menurut catatan BPS, komoditas ekspor utama Indonesia ke Rusia dan Ukraina adalah lemak serta minyak hewan dan nabati. Sementara, komoditas impor dari Rusia adalah besi dan baja,

pupuk, serta bahan bakar mineral. Adapun, impor utama Indonesia dari Ukraina adalah serealia, besi dan baja, serta mesin dan peralatan mekanis.

Serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Gangguan impor pupuk akan berdampak pada produksi pangan dalam negeri. Belum lagi serealia yang menjadi bahan pokok produksi makanan.

Perang Rusia dan Ukraina menimbulkan ketidakpastian perekonomian global. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, harga beberapa komoditas penting dunia mengalami gejolak, seperti minyak bumi, gas alam, gandum, dan pupuk. Pada 2020 ekspor minyak bumi Rusia menguasai 11% total ekspor minyak bumi global. Rusia juga menguasai 17,6% seluruh ekspor gandum dunia.

Sementara itu, Indonesia yang pada November 2022 akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, berniat mengundang seluruh pemimpin

negara anggota G20, termasuk Putin, Pemimpin Rusia. Niat Indonesia itu ditentang beberapa negara anggota G20. Namun, Indonesia tetap berpegang pada aturan yang berlaku bahwa pemimpin forum wajib mengundang semua anggotanya.

Pertemuan G20 diharapkan mampu mencairkan hubungan beberapa anggota G20 yang cukup memanas dalam beberapa bulan terakhir akibat pro kontra terhadap perang Rusia-Ukraina. Harapan besar ada di Indonesia. Semoga KTT G20 yang diselenggarakan di Bali menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan, baik dari sisi ekonomi maupun politik. ■



Hariyadi Sukamdani; kena imbasnya



IBK Bank Indonesia

PIUTANG YANG NYATA - NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. BANK IBK INDONESIA

Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank IBK Indonesia mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

TAHUN 2020: Rp 212.502.945.680

TAHUN 2021: Rp 65.235.343.123

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat ditagih sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

PENGUMUMAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. BANK GANESHA, TBK

BANK GANESHA

Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT. BANK GANESHA,TBK mengumumkan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tahun pajak 2021 sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH SALDO	NO	NAMA	JUMLAH SALDO	NO	NAMA	JUMLAH SALDO	NO	NAMA	JUMLAH SALDO
1	RADIUS RABNUR	697.123.091,37	24	JULI HARFAN	15.879.101,21	47	TUSMANTORO	11.045.768,69	70	ARI SUBIADI	8.330.049,67
2	ADRIAN HADI	306.354.874,48	25	PUTRA ANUGERAH BUWANA	15.483.105,57	48	SARWANTO	10.446.354,41	71	ADI CHANDRA	8.326.113,92
3	ADRIAN HADI	375.918.969,57	26	Bobby ADRIAN	15.287.851,20	49	LAMIN	10.329.891,08	72	WILDAN	8.305.547,77
4	ILVIA ROZI	38.108.946,83	27	LAMRIAH	15.211.787,19	50	UJANG	10.306.007,39	73	KEMAS SUPRIYONO	8.261.229,98
5	TIA AKIONG	31.494.506,55	28	E. SULASTRI	15.021.211,12	51	KEMAS SUPRIYONO	10.101.104,12	74	SHARIF HIDAYAT	8.244.736,85
6	RAHMATTULLOH	29.853.918,67	29	INDRA HERMAWAN	14.639.192,67	52	DONY AGUS PRABOWO	9.988.232,88	75	HONG HUA	8.218.272,41
7	DEDI	29.519.746,37	30	RINDU PERMATA SARI	14.148.120,91	53	ENDAR SUARIKO S TONO	9.956.566,44	76	SYAHRONI	8.149.913,80
8	DERMAWAN	25.857.457,92	31	JARNUZI	13.770.284,24	54	ANA	9.855.439,26	77	AHMAD UJANG	8.094.823,63
9	MAJD MUHAMAD HARIS	25.166.436,67	32	ARMAN TONI	13.569.859,34	55	DIAN DWI KURNIAWAN	9.845.677,90	78	MISAN	8.042.167,58
10	VICTOR HUTAHAEAN	24.884.327,45	33	SUSILO CHOIRUL ANWAR	12.958.889,63	79	DAUD	8.023.409,96	80	LUTFY NURROHMAN	7.762.311,95
11	HERI ATMAJA	24.806.570,99	34	RAMUN PRIVANTO	12.762.863,44	81	ROIH UTAMA BIN ASMAN	9.719.561,06	82	WIDYANTO	7.755.495,01
12	RISKY F TUMONGGOR	24.149.524,62	35	ENDANG SUPRIATNA	12.737.366,87	83	NOVERA	9.577.601,82	84	SUPRIYADI	5.802.394,34
13	WINARTI	23.241.598,45	36	ALAN GARIND PORSEA	12.567.535,45	85	SUBIVANI	9.573.238,61	86	M SOYAN	5.742.798,06
14	RUDI ARIYANTO	21.559.821,60	37	TRI AGUS RIYAD	12.489.286,01	87	DIDI SUHENDAR	9.442.573,28	88	RAHMAT WAHYUDI	7.650.822,80
15	ROSULINA	21.556.173,27	38	DEKA INDRA PRASETYO	12.250.599,66	89	DIDI JUHDI FIRMANSYAH	8.939.024,91	90	IMAM MUTAQIN	7.423.170,02
16	YUSTINA	20.843.402,92	39	YUHAR SEDYO BARATA	12.249.623,10	91	ADE MAULANA	8.904.307,68	92	SLAMET ARMAJI	7.315.042,58
17	MOCH. DEZAN ELY RUDI	20.198.562,53	40	SURIKTO	12.146.837,26	93	WINDAR PRIYANTO	8.903.242,22	94	MUHAMMAD JUNAIDI	7.219.436,45
18	HENDRI	18.993.518,11	41	SALBINI	12.142.243,88	95	SAUBIH	8.812.197,51	96	SURYANA	7.180.697,56
19	DIANAH	18.272.647,30	42	MARGANA	11.683.042,60	97	DEDI EPENDI	8.691.505,36	98	BENJAMIN AULIA	7.162.003,78
20	ADELINA FERONIKA SITORUS	17.733.974,43	43	JUFRIADI	11.474.156,58	99	AHMAD FATHAHILAH	8.561.338,74	100	MISYATI	6.973.420,65
21	ANITA WIJAYA	17.424.766,85	44	IYO	11.446.976,36	101	BAKRUDIN	6.943.640,40	102	ERIK RUPIANI	6.726.650,23
22	ROBBY TUMANGKENG	16.447.220,75	45	DENI SYAFRUDIN	11.068.398,62	103	ALLI SURYA ABADI	8.535.402,86	104	TEGUH SETIawan	6.536.216,58
23	MADE WIRAWAN	16.422.154,15	46	AAN RUSTIAN	11.066.673,40	105	SURAJI	8.412.359,69	106	TOTAL	3.134.583.617,12
											yang jumlahnya tidak melebihi Rp.5.000.000,-

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana di atas adalah sebagaimana tercatat di Bank dan akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PP Badan sebagai lampiran.

Paylater Hadir, Kartu Kredit Tetap Eksis

Setelah digempur pandemi, bisnis kartu kredit kini juga dihantam kehadiran cicilan skema bayar tunda atau *paylater*. Bagaimana tren penggunaan kartu kredit?

Era digitalisasi telah membuat pola transaksi masyarakat bergeser ke arah digital. Salah satu kemudahan yang ditawarkan dan menjadi pilihan masyarakat akhir-akhir ini adalah model pembayaran cicilan dengan skema bayar tunda atau *buy now pay later (BNPL)*. Model ini makin populer karena memberikan kemudahan dan kecepatan. Penggunanya pun bisa mengatur keuangan di masa perekonomian belum stabil seperti sekarang ini.

Berdasarkan Laporan Perilaku Konsumen *e-Commerce* Indonesia 2021, sebanyak 27% konsumen telah menggunakan *paylater*. Layanan *paylater* telah menjadi alternatif pembayaran cicilan yang populer selain kartu kredit – yang menawarkan pembiayaan *point-of-sale (POS)* instan untuk berbelanja *online* pada 2020.

Melihat peluang pasar *paylater* yang cukup besar, beberapa perusahaan *financial technology (fintech)* di Tanah Air ikut bermain di bisnis ini. Sebut saja Kredivo, Indodana PayLater, dan Traveloka PayLater.

Pertumbuhan penggunanya pun terbilang cukup pesat. Saat ini Kredivo memiliki lebih dari 4 juta pengguna atau lebih dari 50% dari basis pengguna kartu kredit di Indonesia. Sedangkan, *wallet share*-nya mencapai 50% di mayoritas *merchant e-commerce* di Indonesia. Sementara, rata-rata konsumen berbelanja sebanyak 25 kali dalam setahun, dengan nilai rata-rata pembelanjaan hingga 30% lebih tinggi menggunakan Kredivo. Angka itu jauh melampaui pemain global lainnya.

Indina Andamari, *VP Marketing and Communications* Kredivo, mengungkapkan bahwa layanan *paylater* telah memberikan keuntungan, tidak hanya untuk para pemainnya, tapi juga bagi seluruh ekosistem terkait. “*Paylater* juga menguntungkan untuk *e-commerce* atau *merchant* karena dapat membantu mereka meningkatkan nilai rata-rata serta frekuensi pembelian dengan menawarkan keleluasaan bagi pelanggan untuk



Transaksi kartu kredit; kinerja membaik

membayar nanti secara berkala,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurut Indina, *fintech paylater* mengisi kesenjangan yang ada. Karena, berdasarkan data pengguna kartu kredit di Indonesia pada 2019, penetrasi kartu kredit masih sangat minim, hanya 3,5% dari total penduduk Indonesia.

Kepada *Probank*, Steve Martha, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), mengakui keberhasilan *fintech paylater* dalam menjangkau konsumen secara lebih luas dan memberikan edukasi bagi masyarakat yang tidak mengerti *formal financial service*. “Kartu kredit yang sulit untuk dimiliki membuat penetrasi lambat. Akhirnya, susah bagi pelaku bisnisnya. Karena, jangan lupa, kartu kredit itu perlu salah satu investasi alat lagi, yaitu penerimaan dan transaksinya. Ini yang menyebabkan penetrasi ke daerah-daerah luar masih kecil dan sedikit lambat,” ujar Steve.

Dalam perkembangannya, meski penetrasinya lambat, lalu mengalami gejolak hebat akibat pandemi dan gempuran *BNPL* sebagai saingan baru, bisnis kartu kredit tetap eksis dan menunjukkan taringnya kembali. Kinerja kartu kredit pun perlahan-lahan kian membaik.

Bank Indonesia (BI) mencatat, nominal transaksi kartu kredit tumbuh 2,35% menjadi Rp244,52 triliun per Desember 2021. Pada periode yang sama, volume transaksi kartu kredit tumbuh 2,63% menjadi 281,90 juta transaksi. Ke depan, apakah pertumbuhan kartu kredit akan terus berlanjut?

“Tergantung dengan situasi. Kartu kredit itu alat bayar, bukan hanya kredit. Alat bayar itu tergantung sekali dengan transaksi masyarakat. Kalau pandemi belum selesai, otomatis kartu kredit juga tidak jalan. Tapi, sekarang sudah mulai membaik, seperti ritel dan *e-commerce* mulai naik. Yang belum naik di sisi *travel*, khususnya *travel* luar negeri. Sedangkan, kartu kredit itu tugas, pokok, fungsi (tupoksi) besarnya juga ada di *travel*. Jadi, kami harap pandemi segera membaik, otomatis kartu kredit kembali membaik dan digunakan lagi,” tambah Steve. ■

PERKEMBANGAN KARTU KREDIT 2019 - 2022

No.	Komponen	2019	2020	2021	Δ (%)	Jan 2021	Jan 2022 *	Δ (%)
1	Jumlah Kartu (Juta)	17,49	16,94	16,51	-2,52	16,84	16,55	-1,71
2	Volume Transaksi (Ribu)	349.212	274.682	281.901	2,63	21.368	27.596	29,15
	- Volume Transaksi Tunai	8.964	6.473	4.850	-25,07	403	432	7,14
	- Volume Transaksi Belanja	340.249	268.210	277.051	3,30	20.965	27.164	29,57
3	Nilai Transaksi (Rp Miliar)	342.683	238.904	244.516	2,35	18.220	24.746	35,82
	- Nilai Transaksi Tunai	10.038	7.350	6.767	-7,93	463	605	30,89
	- Nilai Transaksi Belanja	332.645	231.553	237.749	2,68	17.757	24.140	35,95
4	Penyelenggara Kartu Kredit							
	- Penerbit (Unit)	25	26	27	3,85	26	27	3,85
	- Acquirer (Unit)	15	17	16	-5,88	17	16	-5,88
	- Prinsipal (Unit)	5	5	5	-	5	5	-
	- Penyelenggara Kliring (Unit)	4	4	4	-	4	4	-
	- Penyelenggara Penyelesaian Akhir (Unit)	4	4	4	-	4	4	-

Keterangan: - Δ : pertumbuhan (%) - *: angka sementara

Sumber: Bank Indonesia.

Keamanan Siber, Tantangan Digitalisasi Perbankan

Cyber crime menjadi masalah yang harus diantisipasi pelaku bisnis di industri keuangan. *Cyber crime* selalu berkembang dan modusnya makin canggih. Bagaimana regulator dan pelaku bisnis di industri keuangan menyikapinya?

Digitalisasi di sektor jasa keuangan terus berkembang dengan sangat cepat. Sayang, perkembangannya diikuti dengan meningkatnya kasus-kasus kejahatan siber (*cyber crime*) yang merugikan nasabah dan institusi keuangan. Di satu pihak, penyedia layanan jasa keuangan ingin memberikan layanan yang prima dengan mengembangkan teknologinya. Namun, di lain pihak, pelaku kejahatan siber punya banyak cara untuk melakukan kejahatannya. Makin hari pelaku kejahatan siber ini makin cerdik dalam menjalankan aksinya dengan menerapkan beragam modus.

Sektor keuangan adalah sektor yang sangat rentan terhadap serangan siber. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 2021 sektor keuangan menempati urutan kedua sebagai target serangan siber. Tahun sebelumnya, yakni 2020, sektor keuangan berada di posisi pertama sebagai sektor yang menjadi target serangan siber. Pada 2021, sektor pemerintah menempati urutan pertama (45,5%) sebagai sektor yang rentan serangan siber, diikuti sektor keuangan (21,8%), telekomunikasi (10,4%), penegak hukum (10,1%), dan transportasi (10,1%). Meskipun menduduki posisi kedua, secara umum gangguan dan kerugian yang ditimbulkan dari serangan siber di sektor keuangan masih menempati posisi tertinggi.

Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyatakan, inovasi perbankan digital adalah suatu keniscayaan dan memberikan dampak positif. Namun, inovasi perbankan digital ini menurutnya tidak hadir tanpa risiko. Beragam risiko, seperti risiko kepatuhan digital dan risiko keamanan siber, akan muncul bila digitalisasi tidak dikawal dengan baik.

Antisipasi yang diwujudkan dalam manajemen risiko yang memadai menjadi langkah penting ketika satu institusi ingin



Transaksi keuangan digital; target serangan siber

mengembangkan ke arah digital. Selain itu, jaring pengaman keuangan yang ada di Indonesia berperan penting. “Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, dan Kementerian Keuangan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Purbaya.

Menurutnya, model ancaman kejahatan siber itu antara lain *social engineering* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu dan *skimming* atau tindak pencurian informasi dengan cara menyalin informasi nasabah yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit dan debit yang dilakukan secara ilegal.

Sebagai otoritas penjamin simpanan, LPS memandang bahwa kejahatan siber perlu mendapat perhatian lebih – utamanya bagi pihak penyedia layanan perbankan, perlu memastikan sistem manajemen risiko yang andal dan telah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

"Nasabah selaku pengguna juga perlu mengetahui berbagai modus kejahatan siber agar selalu waspada dalam bertransaksi secara digital. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan *awareness*, terutama ancaman siber dan berbagai modus penipuan," tambahnya.

LPS telah menerapkan berbagai langkah pengamanan sistem dan data LPS. Tujuannya, para penyimpan dana di perbankan merasa aman dan percaya untuk terus menyimpan dananya di perbankan. Selain berbagai *tool* standar keamanan sistem informasi, seperti antivirus, *virtual private network* (VPN), dan *firewall*, LPS telah menerapkan sistem *data loss prevention* (DLP) untuk mencegah adanya kebocoran data.

Pengamanan sistem informasi di LPS dilaksanakan dan dikelola dengan memperhatikan empat aspek keamanan informasi, yaitu ketersediaan (*availability*), yakni aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan; keutuhan (*integrity*), yakni aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang (*authorized*); kerahasiaan (*confidentiality*), yakni aspek yang menjamin kerahasiaan data, memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang; dan tidak dapat disangkal (*non-repudiation*), yakni aspek yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi.

Pengembangan Institusi dan Edukasi Masyarakat

Terkait dengan penguatan dan peningkatan penegakan hukum di bidang kejahatan, terutama di masa digital seperti sekarang, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berencana memperbesar Direktorat Siber agar tersedia di setiap daerah di Indonesia. Alfis Suhaili, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, mengungkapkan, saat ini institusi keamanan siber daerah masih berbentuk subdirektorat.

Pihaknya sudah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperbesar skala pengamanan menjadi direktorat tersendiri. "Kami sudah mengajukan kepada Menpan RB agar setiap wilayah dibentuk direktorat siber. Karena beban kerja dan ancaman kejahatan siber ini perkembangannya sangat luar biasa," terang Alfis.



Purbaya Yudhi Sadewa; tidak tanpa risiko

digandeng untuk memperkuat penegakan hukum di dunia maya.

Meskipun *cyber crime* telah menjadi tantangan utama dalam proses menuju digital, bank-bank di Tanah Air saat ini sudah berkomitmen untuk melindungi nasabahnya dari ancaman siber. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, berkomitmen untuk melindungi nasabah.

Achmad Syafii, Direktur Teknologi Informasi BSI, mengatakan, BSI bersinergi dengan Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam membangun infrastruktur digital termasuk dalam hal perlindungan nasabah. "Jadi, kami bekerja sama dengan induk kami di samping kemampuan kami sendiri sehingga

saling melengkapi untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan *security*," ujar Achmad.

BSI juga terus menggalakkan edukasi kepada nasabahnya terkait dengan kejahatan siber. Edukasi kepada nasabah penting dilakukan agar mereka menjadi lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital. "Edukasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kami lakukan terhadap nasabah kami agar mereka juga *aware* bahwa *cyber attack* itu tidak langsung menyerang ke sisi perbankan tapi juga dari sisi nasabahnya sendiri," ucapnya.

Achmad berharap pemerintah bisa memperkuat infrastruktur yang lebih aman sehingga dapat memberikan perlindungan bagi nasabah maupun industri. Misalnya, penerapan *single gateway system*, sehingga lalu lintas data bisa dimonitor dengan baik. ■



"Edukasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kami lakukan terhadap nasabah kami agar mereka juga *aware* bahwa *cyber attack* itu tidak langsung menyerang ke sisi perbankan tapi juga dari sisi nasabahnya sendiri."

Potensi Besar Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Meksiko

Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi pemain kunci di kawasan. Begitu juga dengan Meksiko sebagai salah satu pemain besar di Benua Amerika. Kerja sama kedua negara ini sangat menjanjikan dan bisa menjadi pembuka jalan untuk kerja sama yang lebih besar.

Sebagai negara dengan potensi sumber daya yang besar, tak mengherankan bila Indonesia menjadi perhatian banyak negara di dunia. Salah satu negara yang menaruh perhatian terhadap Indonesia ialah Meksiko. Bahkan, Meksiko dan Indonesia telah melakukan kerja sama bilateral yang cukup intens, seperti di bidang perdagangan.

Mendengar nama Meksiko, mungkin yang terlintas dalam benak sebagian masyarakat adalah sebuah negara yang terkenal dengan bisnis narkobanya. Namun, terlepas dari itu, Meksiko memiliki potensi besar nan menjanjikan bagi Indonesia. Meksiko adalah potensi pasar untuk produk perikanan, transportasi laut, dan rempah-rempah asal Indonesia. Sedangkan, dari Meksiko, Indonesia bisa mendapatkan mesin dan peralatan listrik, mesin dan pesawat mekanik, kendaraan dan bagiannya, tembaga, hingga perangkat optik.

Indonesia dan Meksiko tampaknya cukup serius menjalin kerja sama. Hal itu ditunjukkan dengan telah dilakukannya kesepakatan antardua negara. Salah satunya, pada Juli 2021, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MOU*) kerja sama imbal dagang *business-to-business (B-to-B)* antara perusahaan di Indonesia dan perusahaan di Meksiko.

Kerja sama imbal dagang *B-to-B* sendiri adalah inovasi bisnis *partnership* baru yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascamasa pandemi COVID-19. Kerja sama imbal dagang *B-to-B* antara Indonesia dan Meksiko diharapkan akan menjadi tonggak peningkatan kerja sama antardua negara di masa depan.

Kerja sama antara Indonesia dan Meksiko ini akan makin memperkaya *global value chain*. Kekuatan perdagangan yang sebelumnya didominasi oleh Tiongkok, kini dilengkapi dengan kehadiran Meksiko. Kehadiran Meksiko sebagai mitra dagang Indonesia dapat menjadi pengganti eksistensi Tiongkok untuk sementara waktu di kala krisis.

Sejak awal 2021, Kemendag telah menjalin kerja sama imbal dagang *B-to-B* dengan puluhan negara. Selain Meksiko, deretan negara lainnya yang telah menjalin kerja sama imbal dagang *B-to-B* dengan Indonesia, antara lain Turki, Rusia, Afganistan, Jerman, Belanda, Prancis, Filipina, India, dan



Mexico City; pintu masuk wilayah Amerika

Iran. Respons positif dilontarkan oleh banyak negara terhadap kerja sama imbal dagang *B-to-B* dari Indonesia.

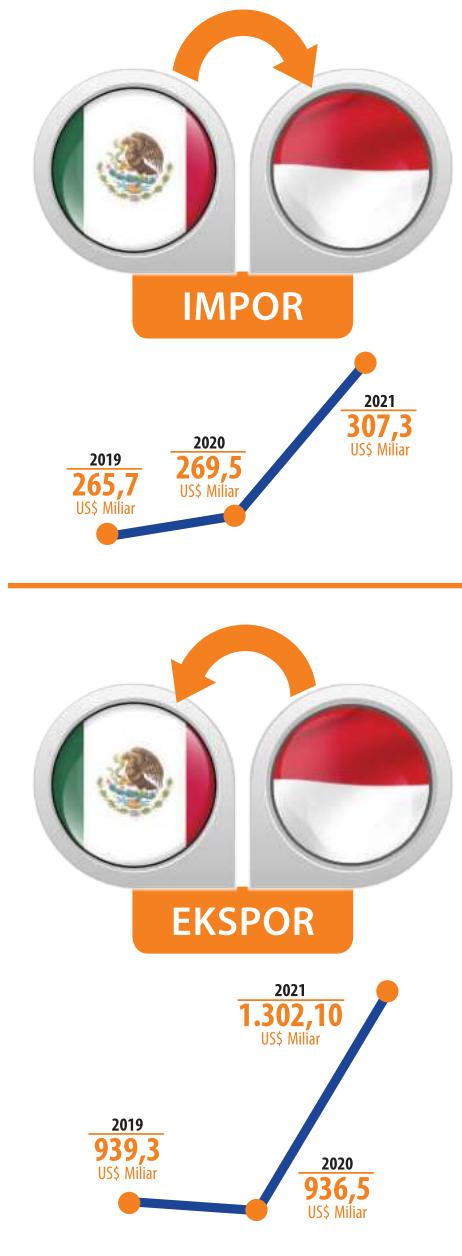
Sebagai proyek pertamanya, dalam kerja sama imbal dagang dengan Meksiko, Indonesia mengekspor pupuk urea, pupuk batu bara, arang batok kelapa, dan ragam rempah seperti kayu manis, pala, dan lada. Sementara itu, Meksiko menawarkan biji wijen dan minyak nabati berupa kanola dan biji bunga matahari.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemasok makanan laut ke Meksiko. Warga Meksiko memang penikmat makanan laut. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk mengimpor ikan karena konsumsi ikan dalam negerinya yang melonjak hingga melebihi pasokan. Selain itu, Meksiko tidak memiliki perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, yang menyebabkan Meksiko tak bisa berdagang melalui jalur laut.

Potensi lain yang bisa ditawarkan kepada negara yang terletak di Amerika Utara ini ialah rempah-rempah. Di Meksiko rempah-rempah dari Indonesia tidak hanya untuk bumbu dapur, tapi juga digunakan sebagai bahan dasar komestik.

Produk mi instan dan rempah-rempah menjadi produk favorit dalam program skema imbal dagang dengan Meksiko. Akhir 2021, Kemendag telah memfasilitasi penandatanganan kontrak jual beli melalui skema imbal dagang antara PT

Neraca Perdagangan Indonesia dan Meksiko 2019 - 2021



NERACA PERDAGANGAN	
2019	US\$673,6 Miliar
2020	US\$667,0 Miliar
2021	US\$994,8 Miliar

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dari Indonesia dan Cluster de I+D y TICs dari Meksiko sebagai pelaksana imbal dagang.

“Penandatanganan kontrak merupakan proyek yang dilakukan pertama kali bagi kedua negara. Kontrak senilai US\$150.000 merupakan bukti nyata keseriusan Indonesia dan Meksiko dalam meningkatkan *on-top export* melalui kerja sama imbal dagang *B-to-B*. Hal itu diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi, baik bagi Indonesia maupun Meksiko,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Didi Sumedidan.

Indonesia mengekspor rempah-rempah dan mi instan, untuk diimbaldagangkan dengan empat produk dari Meksiko, yakni biji wijen, minyak wijen, minyak kanola, dan minyak alpukat. “Pengiriman produk-produk tersebut dari dan ke masing-masing negara ditargetkan akan mulai dilakukan pada November 2021 sampai dengan Juni 2022,” terang Didi.

Kemendag mencatat total perdagangan nonmigas Indonesia dengan Meksiko pada 2021 mencapai US\$1,3 triliun, meningkat 39,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun impor nonmigas dari Meksiko pada 2021 tercatat US\$307 juta atau meningkat 14,03% dibandingkan dengan 2020.

kerja sama sosial dan budaya

Menyikapi tantangan ke depan, diperlukan kolaborasi yang masif pada berbagai bidang. Kolaborasi yang masif pada berbagai bidang akan membuka peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru berarti keuntungan baru. Indonesia dan Meksiko telah menyepakati sejumlah kerja sama untuk bidang kesehatan, ekonomi digital, pertanian, pariwisata, serta *sustainable green economy*. Sektor-sektor tersebut akan menjadi sektor-sektor tumpuan di masa depan.

Bericara mengenai kerja sama Indonesia dengan Meksiko tak bisa dilepaskan dari adanya fakta terkait perbedaan budaya. Perbedaan budaya dan bahasa menjadi fondasi dalam mewujudkan kerja sama yang erat antarnegara. Indonesia dan Meksiko juga *concern* terkait dengan peningkatan *people to people contact* dalam kolaborasi pada bidang sosial dan budaya, seperti pengelolaan warisan budaya dan beasiswa seni budaya atau bahasa.

Perhatian soal situasi terkini di kawasan juga dapat menjadi landasan ekspansi kerja sama antara Indonesia dan Meksiko ke depan. Indonesia yang adalah negara besar di kawasan Asia Tenggara bersanding dengan Meksiko sebagai salah satu negara besar di kawasan Amerika. Berdasarkan luas area, Meksiko merupakan negara urutan kelima di Benua Amerika. Indonesia akan menjadi lilin penerang untuk Meksiko terkait kondisi atau persoalan di Asia Tenggara. Meksiko menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk pengetahuan dan politik di wilayah Asia Tenggara.

Di lain sisi, Indonesia menjadikan Meksiko sebagai pintu masuk menuju wilayah Amerika. Meksiko akan menjadi cahaya pelita bagi Indonesia dalam melakukan eksplorasi di wilayah Amerika.

Kedua negara dapat saling bertukar informasi terkait kondisi di masing-masing kawasan. Informasi yang ditukarkan tidak hanya terbatas pada ekonomi, tapi juga terbuka untuk banyak sektor, seperti sektor keamanan, kesehatan, politik, hingga olahraga.

Pertukaran informasi antarkedua negara akan menguntungkan satu sama lain. Banyak kasus atau masalah dapat dicegah dengan pertukaran informasi, mulai dari kasus sindikat narkoba, terorisme, *human trafficking*, hingga yang lainnya.

Di samping itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Meksiko akan menjadi landasan kuat untuk kolaborasi pada skala global. Di tingkat global seperti G20, APEC, MIKTA (kelompok kerja sama Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia), dan FEALAC (Forum for East Asia – Latin America Cooperation), Indonesia dan Meksiko tercatat memiliki kerja sama yang baik. ■

Awas, Dampak Perang Rusia-Ukraina!

Perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Perang yang berkepanjangan ini menimbulkan efek rambat pada perekonomian global. Negara-negara Eropa dan Amerika jadi pihak yang cukup terdampak.

Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 sampai kini masih berlangsung, dan belum jelas kapan Rusia akan mengakhiri invasinya itu. Perundingan untuk menyelesaikan konflik pun sudah dilakukan, tapi belum juga membawa hasil. Padahal, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin ini sudah diberi sanksi ekonomi bertubi-tubi oleh Amerika Serikat (AS) dan negara Barat atas tindakannya menyerang Ukraina dalam bentuk larangan ekspor, larangan transaksi keuangan perbankan, penyitaan aset-aset bank, dan pengurangan impor komoditas energi Rusia. Sanksi tersebut diberikan dengan harapan dapat mengurangi kemampuan Rusia dalam melanjutkan invasi ke negara tetangganya itu. Presiden Putin tetap bergeming dan terus melakukan langkah antisipatif untuk mempertahankan perekonomian negaranya.

Perang Rusia-Ukraina, suka tidak suka, memang telah berdampak terhadap perekonomian global, terutama bagi negara-negara Eropa dan AS. Bagaimana tidak? Rusia dan Ukraina adalah dua negara penyuplai komoditas energi global, seperti minyak mentah dan gas alam. Selain AS yang 3% konsumsi minyaknya berasal dari Rusia, negara-negara Eropa bergantung pada suplai impor Rusia. Contohnya saja Jerman yang 50% stok gas alam dan 30% stok minyak mentahnya berasal dari Rusia. Tidak mengherankan jika harga komoditas energi Eropa tercatat melonjak 45% akibat terganggunya rantai pasok global.

Harga minyak mentah dan gas alam global terus merangkak naik. Trading Economics mencatat per 6 April 2022 harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) masih berada di kisaran US\$99,60 dan Brent masih di US\$104,70 per barel.



Invasi Rusia ke Ukraina; berdampak pada perekonomian global

Sementara itu, grafik harga gas alam mengalami kenaikan hingga di level US\$6 per Million British Thermal Unit (MMBTU).

“Konsumsi rumah tangga menjadi lebih pesimistis dan cenderung mengurangi pengeluaran. Semakin lama perang berlangsung, semakin tinggi biaya ekonomi dan semakin besar kemungkinan kita berakhir dalam skenario yang lebih buruk,” ujar Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), dalam pidatonya di Siprus, akhir Maret 2022.

Krisis energi yang ditimbulkan oleh hilangnya salah satu pemasok komoditas besar pada akhirnya juga memicu naiknya tingkat inflasi. Eurostat memperkirakan inflasi tahunan di kawasan Euro sebesar 7,5% pada Maret 2022, naik dari 5,9% dari bulan sebelumnya. Melihat komponen utama inflasi, energi diperkirakan memiliki tingkat tahunan tertinggi pada Maret (44,7%, dibandingkan dengan 32,0% pada Februari). Kenaikan ini diikuti oleh makanan, alkohol dan tembakau (5,0%, dibandingkan dengan 4,2% pada Februari 2022), barang industri nonenergi (3,4%, dibandingkan dengan 3,1% pada Februari 2022) dan jasa (2,7%, dibandingkan dengan 2,5% pada Februari 2022).

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Saat ini tingkat inflasi di Indonesia masih terbilang stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,66% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,95. Inflasi inti pada Maret 2022 tercatat 0,30% (*month to month/mtm*), relatif stabil dibandingkan dengan inflasi Februari 2022 yang sebesar 0,31% (*mtm*). Sementara itu, secara tahunan, tingkat inflasi dari Januari-Maret 2022 mencapai sebesar 1,20% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) mencapai sebesar 2,64%.

Meski inflasi stabil, yang jelas dampak kenaikan komoditas global mulai terasa. Harga minyak mentah yang kian melambung memaksa pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, Pertamina sudah menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Pada awal April 2022, Pertamax juga ikut naik menjadi Rp12.500 per liter, meski masih di bawah harga keekonomian. Kenaikan harga BBM bisa saja menjadi sinyal bagi pemerintah untuk berhati-hati terhadap gejolak geopolitik yang ada. Apabila tidak ditangani dengan tepat, bukan mustahil jika angka inflasi Indonesia bisa ikut merangkak naik. ■

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi - Tahun 2017
Nama Debitur dengan Pinjaman di Atas Rp5.000.000,00

(Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015)



No	Nama Debitur	Jumlah Rp.	No	Nama Debitur	Jumlah Rp.	No	Nama Debitur	Jumlah Rp.
897	YANI HANDAYANI	19.367.944	911	YOHANES EMI NUGROHO	12.226.370	925	YUSUF MAULANA	24.583.782
898	YANI HAYANI	8.632.899	912	YOS TRI WAHONO	17.326.464	926	YUSUF ROSIDIN	7.888.967
899	YANI SURYANI	17.924.656	913	YULI ANZELINA	24.442.665	927	YUSUP BIN KAMIN	31.746.814
900	YANTI SUPRIYATIN	22.175.090	914	YULI JULIANTI	24.442.665	928	YUYUN YUNINGSIH	17.516.022
901	YANTO	26.073.782	915	YULI SETYARINI	18.026.845	929	ZAENAL ARIFIN	54.514.970
902	YANTO	18.415.702	916	YULIANA SAPITRI	23.829.915	930	ZAENUN	19.367.944
903	YATTI	17.326.464	917	YULIANAH	24.442.665	931	ZAHRA	31.692.966
904	YAYAH WARIAH	14.342.110	918	YULIATI	25.367.376	932	ZAINUL HAKIM	23.550.742
905	YAYAN MULYANA	6.826.087	919	YULIAWATI	21.582.624	933	ZENAL RENALDI	13.512.057
906	YAYAN SUSANTI	17.927.670	920	YULIAWATI	14.443.182	934	ZULKANEDI	20.879.380
907	YENI MULYANI	10.058.752	921	YULISTIANA	21.060.468			
908	YOGA NURICHLAM	22.009.178	922	YULIYANTI	11.534.616			
909	YOGA SAPUTRA	11.927.244	923	YUNI RAHMAWATI	15.844.480			
910	YOHANA FRANSISCA TUTUT SARIWARA	28.578.740	924	YUSI ROSIANA	25.112.290			

Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih diatas Rp 5.000.000	52.528.778.273
Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih dibawah Rp 5.000.000	106.784.819
Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih	52.635.563.091

**Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi - Tahun 2018
Nama Debitur dengan Pinjaman di Atas Rp5.000.000,00**

(Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015)



No	Nama Debitur	Jumlah Rp.
1	AAM AMIDAH	9.371.890
2	AANG KHUNAEFI	16.857.501
3	ABAD BADRUdin	6.944.360
4	ABDA RIDWAN MALIK	39.093.715
5	ABDUL JELANI	39.541.204
6	ABDUL KARIM	20.724.441
7	ABDUL KHOLIK	38.557.829
8	ABDUL LATIP	28.713.074
9	ABDUL ROHIM	17.405.784
10	ABDUL WAHAB	34.598.494
11	ACAH	15.111.487
12	ACE NURZAMAN	18.313.601
13	ACEM	17.041.783
14	ACHMAD GOJALI	40.259.579
15	ACHMAD TAKIYUDIN	14.894.539
16	ADAM DIBRATA	12.139.796
17	ADANG TISNA WIJAYA	48.658.230
18	ADE KUSNANDAR	19.446.141
19	ADE QASIM SUPRIATNA	38.708.190
20	ADE SUBANDI	200.366.532
21	ADE SUPRIADI	16.293.070
22	ADE SUSANTI	23.450.990
23	ADE WAHYUDI	41.181.921
24	ADEH KOKOM KOMALASARI	8.513.388
25	ADI KRISDIANTORO	50.603.915
26	ADIP AHMAD FAUZI	30.153.313
27	ADITYA PERMANA	20.703.078
28	ADITYA WIRAWANTORO PUTERA	38.594.247
29	AEP SUPARMAN	10.557.976
30	AFRIASI	10.707.980
31	AGUNG PRABOWO	16.808.309
32	AGUNG WICAKSONO	99.641.492
33	AGUNG WICAKSONO	45.383.710
34	AGUS ARIYANTO	56.125.004
35	AGUS BAGIARTO	17.399.476
36	AGUS GUNAWAN	39.541.204
37	AGUS IMAM YUSUF	25.761.936
38	AGUS MULYADI	11.984.907
39	AGUS MULYANA	38.125.889
40	AGUS SAIFUDIN	27.208.114
41	AGUS SANTOSO	23.857.653
42	AGUS SANTOSO	23.238.831
43	AGUS SETIAWAN	16.053.307
44	AGUS SRATMAN	39.541.204
45	AGUS SUPRIYANTO	48.671.114
46	AGUS SUSANTO	11.132.102
47	AGUSTINA WATI	18.498.125
48	AGUSTINUS MURWANTO	117.658.648
49	AHMAD AFANDI	38.956.523
50	AHMAD AMALUDIN	15.897.466
51	AHMAD CHAERUDIN	19.110.466
52	AHMAD HERAYDI	6.258.285
53	AHMAD HIDAYAT	42.568.760
54	AHMAD MUHAMAIM	15.184.131
55	AHMAD MUJADI	28.013.863
56	AHMAD MUSTOFA	5.109.321
57	AHMAD NADIH	38.667.179
58	AHMAD NAWAWI	17.891.844
59	AHMAD SAHYUDI	9.656.697
60	AHMAD SETIAWAN	5.627.446
61	AHMAD SOPIAN	31.634.716
62	AHMAD SOPIAN	27.380.092
63	AHMAD SURYA	68.180.332
64	AHMAD SUTIA	39.541.204
65	AHMAD SYAIFULLOH	29.437.642
66	AHMAD YANI	30.612.465
67	AI ETI HARYATI	20.948.816
68	AI NURAIYAH	8.663.232
69	AI SADIAH	32.314.881
70	AISAH	14.406.139
71	AJI IRAWAN	19.179.326
72	AKHMAD SURIYANI	9.097.640
73	AL AMIR ARI MANU	11.009.148
74	ALBERT GAUTAMA	123.924.776
75	ALEXANDER HAEK	26.121.582
76	ALIFIAN SYAH	12.869.910
77	ALIFU LAILA	32.313.652
78	ALU LUKMAN	19.948.471
79	ALU MAHMUD ZUNAIDI	17.531.594
80	ALU RINOFA	17.726.515
81	ALI SOLIHIN	5.116.590
82	ALI SURATMAN	39.060.845
83	ALIMAH NURMAWANTI	13.808.624
84	ALIN PARLINA	5.854.205
85	ALIPUDIN	32.604.440
86	ALPYANTI	16.702.456
87	ALVIAN PRATAMA	7.569.413
88	AMAH MUTIAH	12.747.581
89	AMALIAH	38.639.888
90	AMBARINI MAULIDYA	11.480.134
91	AMI ELIA	12.537.797
92	AMIATI AWALLIYAH	11.253.860
93	AMROZI	37.169.608
94	AMSAH	29.374.202
95	AMSAR	18.965.427
96	ANANG BUDIANTO	32.230.110
97	ANDI	12.858.822
98	ANDI AMRY MULFAHRI M	20.034.706
99	ANDI MARWANTO	30.306.762
100	ANDI ROYANI	13.761.503

No	Nama Debitur	Jumlah Rp.
201	DANYI PRASiska APSARI	7.362.987
202	DARISTA DWI PRATIWI	14.722.571
203	DARMINI	18.391.621
204	DARSHI MINTARSIH	15.780.139
205	DARTI KURNIAWATI	14.595.210
206	DEAVY ANDREAS TUKIDJO	7.163.379
207	DEBORA CHRISTINA RAHAJENG	75.542.312
208	DEDAH ZUBAEDAH	27.687.073
209	DEDE AHMAD RUSTAND	179.967.095
210	DEDE GUNAWAN	31.272.697
211	DEDE HOTIB	18.503.781
212	DEDE IRPAN	9.732.015
213	DEDE JULIANSYAH	10.178.384
214	DEDE KUSYANA	13.237.065
215	DEDE LISDIAWATI	11.702.044
216	DEDE NANU JUHAENI	30.424.655
217	DEDE RATNA	15.347.636
218	DEDE SAEFULLAH	5.543.842
219	DEDE SUPRIATNA	34.455.263
220	DEDEH WINENGSIH	16.097.220
221	DEDEH WININGSIH	11.358.900
222	DEDEN KURNIAWAN	14.068.744
223	DEDEN KUSMAYADI	9.819.697
224	DEDI SANTOSO	21.404.561
225	DEDI SISMANTO	7.523.821
226	DEDY SUSANTO	48.574.000
227	DEFI ARDIANSYAH	16.966.939
228	DELLA MARSIANA	27.580.899
229	DENDI PURWOWIDODO	30.153.574
230	DENI IM GUNAWAN	176.545.758
231	DENI MURDANI	8.633.539
232	DENNY HARTANTO	14.128.880
233	DENY ARTIVYONO	125.464.831
234	DEPARTEMEN AGAMA REJANG LEBONG	1.488.135.706
235	DESI	10.336.900
236	DESI PARAMITA	7.796.934
237	DESI RESTUAHSIH	19.315.160
238	DESI SAFITRI	24.827.769
239	DESI SURYANINGSIH	23.601.065
240	DESK JEULAND DUMANAUW	72.370.252
241	DEVA MUTIA ELISA	49.959.440
242	DEVI ANGRARIEN SETYAWATI	42.751.000
243	DEVI APRIVANTI	15.111.487
244	DEWI	15.087.941
245	DEWI MARDIYANA	6.872.225
246	DEWI MUSTIKA SARI	11.176.850
247	DEWI ROSITA	32.897.615
248	DEWI WAHYUNI	5.183.968
249	DEWIYANTI	19.220.524
250	DIAN ARDIANA	14.187.995
251	DIAN BUDI FEBRIYANTO	111.055.854
252	DIAN HALEANI	7.816.295
253	DIAN PUJI ANGGRAENI	48.082.786
254	DIAN PURNAMA SARI	40.855.615
255	DIAN PUSPUTA	5.863.964
256	DIAN RATNA JUWITA	9.584.046
257	DIAN SARI	18.852.840
258	DIDAH	14.078.086
259	DIDI ARYADI	12.205.126
260	DIDI FEBRIYANTO	15.484.235
261	DIDIK PURNOMO	59.784.918
262	DIDIK SISWANTO	8.462.359
263	DIDO ANDRIYANA	10.216.326
264	DIKI SUNARYA	17.167.747
265	DIMAS AGUS MAULANA	42.305.910
266	DINA	9.014.389
267	DINDIN SAMSUDIN	12.070.897
268	DINI ANDRIANI	12.016.175
269	DINI MARDIANA	21.203.934
270	DINI SITI HAERANI	7.206.146
271	DINI SOFIANI	9.808.995
272	DITO SUCIPTO	16.882.463
273	DIYAH LUSIWATI SANTOSO	97.954.936
274	DJASLAN RIDHOHI	12.691.372
275	DODE MULYANA	25.208.423
276	DODI	18.381.209
277	DODI PRAMANA	24.137.764
278	DODI SETIAWAN	14.161.043
279	DODIK MARGIONO	35.906.090
280	DONENG MARTINI	17.026.896
281	DONI MAULANI	23.690.706
282	DONI NUGRAHA	22.361.606
283	DONNY PIETER MAPALIEY	41.675.586
284	DRIANA DEVANTI	12.461.474
285	DUDU MUHARAM	5.405.352
286	DWI BUDIYANTO	10.416.490
287	DWI HANDOKO	53.866.396
288	DWI KARINA	18.141.079
289	DWI SUNARSO	21.001.869
290	DZUHRIL ULUM	6.853.181
291	ECHI MARYANI	16.437.490
292	EDI ALFIAN	7.571.558
293	EDI JUNAEIDI	66.984.362
294	EDI JUNAEIDI	5.931.932
295	EDI SETIADI	17.326.464
296	EDI SUPRIYADI	39.541.204
297	EDI WIJAYA	18.503.634
298	EDISON SIHONTANG	11.067.587
299	EDY ASMARA	43.500.533
300	EEN	32.960.468

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi - Tahun 2018
Nama Debitur dengan Pinjaman di Atas Rp5.000.000,00

(Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015)



No	Nama Debitur	Jumlah Rp.
600	MARJKI	31.935.795
601	MARKUS PRASETYO APRIYANTO	7.209.134
602	MARLINAH	7.272.444
603	MARSINI ANGGREANI	35.906.090
604	MARTINAH	8.723.642
605	MARYAM	5.797.725
606	MARYANTE	12.645.522
607	MARYATI	18.498.125
608	MARYONO	17.549.082
609	MASNAWATI	21.603.660
610	MASRUROH	5.102.664
611	MAWAR WULAN SARI	28.428.860
612	MAY SUDARTA	16.488.307
613	MEITISTA WIDIASTUTI	19.308.290
614	MELLY PERAWATI	7.242.597
615	METI KUSMIATI	15.555.046
616	MIFTAHUDIN	13.324.961
617	MILAH TULAEALAH	15.544.014
618	MILAS WATI	26.672.349
619	MILAWATI	12.465.655
620	MINAR	10.699.609
621	MIRA APIRANI	9.044.237
622	MISAR	39.545.513
623	MOCH SOLEH	66.642.693
624	MOCH SULAIMAN	16.945.593
625	MOCHAMAD FAHREZA	8.380.505
626	MOCHAMMAD IMAM ALGHOZALI	78.234.429
627	MOHAMAD AGUNG FERIADI	20.577.662
628	MOHAMAD SALIM	31.422.171
629	MOHAMAD SHOLEHUDIN	27.580.899
630	MUADI	39.690.998
631	MUBAROK	13.223.591
632	MUDIANA	17.287.526
633	MUDIANSYAH ISHAK	34.700.552
634	MUFID KHAN	74.185.121
635	MUHAMAD AMIR ZAHZAH	39.805.410
636	MUHAMAD ASIM BIN NASAN	33.676.968
637	MUHAMAD ELDI KURNIAWAN	26.709.122
638	MUHAMAD FAJRIN	19.843.075
639	MUHAMAD ISHAK	12.798.558
640	MUHAMAD ISRO	14.110.688
641	MUHAMAD JERI RIFALDI	19.861.770
642	MUHAMAD JUMRONI	52.620.592
643	MUHAMAD LIHA	16.060.945
644	MUHAMAD NAZIR MUKHSIN	47.777.543
645	MUHAMAD SYAFIE	22.109.304
646	MUHAMAD TOHA	67.397.536
647	MUHAMAD YUSUP ISKANDAR	27.599.456
648	MUHAMMAD ASIN	21.495.032
649	MUHAMMAD ASWAD	15.555.079
650	MUHAMMAD JAHARUDIN	26.533.704
651	MUHAMMAD REZA AGASSI	27.324.895
652	MUIS	11.730.838
653	MUKLIS	19.971.152
654	MULYANA	131.022.668
655	MULYANA	9.541.782
656	MULYANI	22.713.874
657	MULYANI	16.593.979
658	MULYONO	14.809.426
659	MUMUN MUNAWAROH	26.290.061
660	MUNASIH	8.441.268
661	MUNIYATI	9.053.219
662	MURENNI MUMIN	7.124.838
663	MURJA	9.123.559
664	MURSITI VERA	15.605.622
665	MURTAZIAH	15.544.014
666	MUSA	23.690.706
667	MUSTAINAH	5.128.032
668	MUSTIKA CHANDRAMOYO	5.266.566
669	MUSTOFA	28.979.139
670	MUTHMAINAH	14.470.369
671	MUTI	11.927.244
672	NANANG DWI PRAYITNO	36.374.623
673	NAME JUWITA SANDI	14.513.634
674	NAME	24.469.657
675	NANI HARYANI	10.469.876
676	NANI PARIDAH	16.090.111
677	NANI PERHATUNIA	27.077.577
678	NANI YUNINGSIH	19.912.908
679	NASIH SUSILAWATI	16.030.652
680	NASRUDIN	32.779.180
681	NATA	27.481.299
682	NATI	15.626.583
683	NELLY MARIA MANIK	17.701.847
684	NENDEN JUARIAH	6.253.041
685	NENENG	16.052.025
686	NENENG HARISTIAWATI	19.725.044
687	NENENG NURMANINGSIH	20.944.909
688	NENG JENAB	12.421.201
689	NENG RISKA YULANTI	10.617.934
690	NENGSIH K	13.077.043
691	NEWI	25.245.525
692	NEVI NURAENI	11.790.970
693	NEVI	14.418.328
694	NEVITA RISMAYANTI	16.570.195
695	NIA HERMAYANTI	20.664.280
696	NIA KANIA	12.729.146
697	NIAWATI	8.386.312
698	NINA ARDILA	18.857.665
699	NINA HERLINA	21.148.068

No	Nama Debitur	Jumlah Rp.
700	NINA YULIANA	9.068.125
701	NINING	11.186.457
702	NITA	15.599.974
703	NOPI WAHYULANTI	16.530.637
704	NOPI YANINGSIH	35.164.923
705	NOPISARI	36.618.741
706	NOVA WARTIA	16.495.046
707	NOVA YULI ANDINI	34.888.070
708	NOVI NURBAETI	22.851.753
709	NOVI YULANINGSIH	11.031.799
710	NOVISATA WAHYUNI	14.879.025
711	NOVITA HERLIYANA BUDI LESTARI	23.732.540
712	NUR AENI	38.492.188
713	NUR AINI	18.721.978
714	NUR AMIN	20.690.663
715	NUR CAHYADI	33.833.712
716	NUR HADI	65.376.314
717	NUR HAYATI BT SANWANI	6.469.592
718	NUR HELAWATINI	9.571.336
719	NUR KHAJATI	13.090.234
720	NURASIAH	16.558.082
721	NURASH	15.626.507
722	NURBAMAN	27.133.635
723	NURDIN	23.482.183
724	NURDIN KOMARULAH	35.283.854
725	NURHADI	19.430.095
726	NURHALIMAH	6.035.423
727	NURHARYANTI	16.225.851
728	NURHASAN	16.709.376
729	NURHASANAH	41.059.357
730	NURHASANAH	29.399.456
731	NURHASANAH	16.882.416
732	NURHASANAH	8.441.268
733	NURHAYANI	49.160.058
734	NURHAYATI	16.767.970
735	NURHAYATI	13.245.148
736	NURHIDAYAT MUHAMAD	11.834.774
737	NURIAH	18.806.210
738	NURJANAH	24.770.618
739	NURJANAH	11.927.244
740	NURWAHIDAH	23.690.706
741	NYVILLA STEPHANIE	15.543.130
742	OBAR	10.421.688
743	OCTAVIANI	16.896.467
744	OKSYANTI	49.226.407
745	OMI	12.801.118
746	OMIH MARYANI	15.107.608
747	OSIM BIN KARDI	22.048.665
748	OYO SURYADI	31.622.129
749	PANCASILA TARIGAN	10.813.742
750	PARIATI	16.179.469
751	PATIMAH	17.318.863
752	PEPEN	38.667.179
753	PERDANA ADI KATMANDONO	20.248.911
754	PERIDAR-SIDOARJO, KP-RI	27.773.120
755	PGRI MEKAR JAYA LAMPUNG SELATAN	594.533.562
756	PIPIN	17.454.000
757	PITRI APRILIA	18.557.465
758	PIUS BIMO ADI NUGROHO	14.851.369
759	POPON	13.590.585
760	PRATOMO BRAMANTIO	80.440.269
761	PRIATNA BASARAH	115.176.776
762	PUDJI SETIONO	49.244.152
763	PURMADI	43.500.533
764	PURWATI	16.673.855
765	RACHMATWATY	44.301.369
766	RADEN MOCHAMAD RAMDHAN	87.822.639
767	RADEN RORO ARMELIA KHRISANTI	78.335.907
768	RAHMAT SUKANDA	17.932.072
769	RALITA DAMAYANTI	28.428.914
770	RANGGA FIRMANSYAH SUPARMAM	41.292.877
771	RANI	9.556.598
772	RANI ANGGRANI	13.874.155
773	RANUM RATNA YULITA	14.713.981
774	RATI PURWASIH	12.605.031
775	RATHI	15.205.548
776	RATHI DAMAYANTI	22.398.528
777	RATIZAH	15.482.099
778	RATNA SUHENTI	17.127.195
779	RATNASIARI	11.574.168
780	RAYI SRI KUSUMANINGRUM	31.611.643
781	RD SITI KURNIADININGSIH	5.750.186
782	RECASURI	11.607.433
783	REDI HIDAYAT	40.473.436
784	RELAWATI	13.568.347
785	RENDA SANJAYA	16.529.238
786	RENI AYU KARDIANASARI	32.768.629
787	RENNY ANISA	49.667.283
788	RESA OKTAVIANI	11.262.190
789	RESHA SUGIARTO PUTERA	7.035.089
790	RIA ARIANTI	23.180.155
791	RIA SUSANTI	71.521.820
792	RIANA DJUMHANA	5.210.799
793	RIANWAR FATHAHILAH	24.638.414
794	RICKY FACHRIZAL	33.224.931
795	RICKY IDRANAWAN GUTOMO	85.432.835
796	RICKY MOHAMAD SAHIDIN	27.753.357
797	RIDWAN	17.716.894
798	RIDWAN SETIAWAN	44.140.108
799	RIDWAN SYAH	14.924.286



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL



Selamat Hari Raya
Idul Fitri
1443 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

